



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LaKIP)
KABUPATEN BARITO SELATAN**



TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 dapat tersusun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 disusun berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai petunjuk teknis dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Barito Selatan untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan selama Tahun 2025, sebagai konsekuensi terhadap komitmen kinerja yang diperjanjikan untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance) menuju Reformasi Birokrasi.



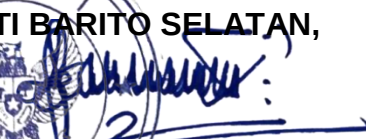
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 ini memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 – 2026.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Barito Selatan tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025.

Buntok, 13 Maret 2026


BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI



IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi menuju *Good Governance*, kinerja merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Laporan kinerja yang diharapkan tidak hanya pemerintah kepada masyarakat tetapi juga Laporan Kinerja kepada Presiden. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2025, yang diformulasikan dari hasil kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan. Hal ini dikarenakan setiap Perangkat Daerah dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas pokok dan fungsinya serta mempertanggung jawabkan program dan kegiatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stake holder*). Setiap Perangkat Daerah maupun pemerintah dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik (*Good Governance*) dan meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 dan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 memuat sasaran yang ingin dicapai pada Tahun 2025 berikut dengan target kinerja yang akan dicapai. Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut telah ditetapkan kebijakan, indikator kinerja sasaran, serta program dan kegiatan yang bersifat operasional. Materi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, disusun berdasarkan Prioritas Daerah dan Plafon Anggaran (PPA) APBD Tahun Anggaran 2025.

Untuk memberi arah pembangunan tahunan pada RPD di buat Fokus Tema Pembangunan Kabupaten Barito Selatan, untuk masing-masing Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dari Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 sebagaimana gambar 1.1 sebagai berikut :



Sumber : Tim Penyusun RPD

Berdasarkan gambar 1.1. dapat dipahami bahwa setiap tahun telah ditetapkan Tema-tema Pembangunan yang menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023-2026 yaitu sebagai berikut:



1.1 Tema Pembangunan pada Tahun 2023 :

“Pengembangan Ekonomi Daerah melalui optimalisasi sumberdaya lokal disertai peningkatan kualitas jaringan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia yang handal”.

1.2 Tema Pembangunan pada Tahun 2024 :

“Mendorong terwujudnya iklim investasi daerah yang kondusif, disertai dgn pemantapan pembangunan jaringan infrastruktur utk peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan”.

1.3 Tema Pembangunan pada Tahun 2025 :

“Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas untuk pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan dan membuka kesempatan kerja yang luas”.

1.4 Tema Pembangunan pada Tahun 2026 :

“Peningkatan kesejahteraan, keadilan, dan keharmonisan masyarakat, serta pengelolaan lingkungan hidup menuju Barito Selatan Dahani Dahanai Tuntung Tulus”.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 sebagaimana yang telah diamanatkan dan berdasarkan :

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.**
- 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).**



3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan serta hambatan-hambatan / kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan, selain itu juga mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Pencapaian Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 yang merupakan kondisi awal dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 sehingga dalam pelaksanaannya untuk pencapaian target kinerja masih memerlukan perencanaan yang matang.

Demikian ikhtisar eksekutif Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025, semoga dapat bermanfaat dan berguna bagi pembangunan daerah dan negara menuju tata kelola Pemerintah Yang Baik (Good Governance).

Buntok, 13 Maret 2026


BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
PERNYATAAN TELAH DIREVIU	
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Kewenangan dan Tugas Pokok serta Struktur Organisasi	2
1. Aspek Politik	2
2. Aspek Manajemen Pemerintah	3
3. Kewenangan	3
4. Tugas Pokok	3
5. Struktur Organisasi	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026	9
B. Hubungan Antara Dokumen RPD	11
C. Tujuan dan Sasaran	14
D. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas	18
1. Strategi Umum	19
2. Strategi Berdasarkan Tujuan dan Sasaran	19
E. Arah Kebijakan	23
F. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	26
1. Indikator Kinerja Utama (IKU)	26
2. Perjanjian Kinerja	31
3. Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Pembangunan (IKP) Kabupaten Barito Selatan	35



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025

BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	37
A.	Pencapaian Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Kabupaten Barito Selatan Dalam Pelaksanaan Program	38
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Potensial dan Ekonomi Kreatif serta Mendorong Masuknya Investasi Daerah	40
2.	Meningkatnya Konektivitas Wilayah	42
3.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	44
4.	Meningkatnya Fungsi Tata Ruang Wilayah Kabupaten	45
5.	Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	46
6.	Menurunnya Kemiskinan di Pedesaan dan Perkotaan	47
7.	Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	49
8.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar Permukiman Masyarakat	50
9.	Meningkatnya Kapasitas Antisipasi dan Penanganan Terhadap Bencana dan Pandemi	54
10.	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	55
11.	Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Yang Akuntabel	57
12.	Meningkatnya Kualitas Inovasi dan Pelayanan Masyarakat	60
13.	Meningkatnya Pengembangan e-Government menuju Smart City	62
14.	Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat	63
15.	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	64



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025

B. Prioritas Pembangunan Tahun 2025	65
C. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	68
D. Realisasi Anggaran Tahun 2025	69
BAB IV PENUTUP	73
LAMPIRAN	



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Tabel 1.1	Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan	8
Gambar 2.1	Hubungan Antara Dokumen Perencanaan	12
Gambar 2.2	Strategi Umum RPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026	19
Tabel 2.1	Penjabaran Tujuan dan Sasaran ke Strategi	20
Gambar 2.3	Tema Pembangunan 2023-2026	25
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama (IKU)	30
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja	31
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Daerah	
Tabel 2.5	Indikator Kinerja Pembangunan	
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Potensial dan Ekonomi Kreatif serta Mendorong Masuknya Investasi Daerah	40
Tabel 3.2.	Capaian Kinerja Meningkatnya Konektivitas Wilayah	42
Tabel 3.3.	Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	44
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Meningkatnya Fungsi Tata Ruang Wilayah Kabupaten	45
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	46
Tabel 3.6	Capaian Kinerja Menurunnya Kemiskinan di Pedesaan dan Perkotaan	47
Tabel 3.7	Capaian Kinerja Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	49
Tabel 3.8	Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar Permukiman Masyarakat	50
Tabel 3.9	Capaian Kinerja Meningkatnya Kapasitas Antisipasi dan Penanganan Terhadap Bencana dan Pandemi	54
Tabel 3.10	Capaian Kinerja Meningkatnya	55



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025

	Ketahanan Pangan Daerah	
Tabel 3.11	Capaian Kinerja Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Yang Akuntabel	57
Tabel 3.12	Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Inovasi dan Pelayanan Masyarakat	60
Tabel 3.13	Capaian Kinerja Meningkatnya Pengembangan e-Government menuju Smart City	62
Tabel 3.14	Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat	63
Tabel 3.15	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	64
Tabel 3.16	Hubungan dan Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Tahun 2023-2026	68
Tabel 3.17	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023 dan 2024	69
Tabel 4.1	Hasil Evaluasi Atas AKIP Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 s.d. 2025	74



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai wujud penerapan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan akuntabel dalam pembangunan daerah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan nasional yang diarahkan untuk mewujudkan menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, mandiri dan bermartabat. Keberhasilan pembangunan nasional tidak mungkin dapat terwujud tanpa didukung oleh Pemerintahan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing, transparan, profesional dan akuntabel. Setiap penyelenggara negara dan pemerintah harus mampu menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan keluaran dan manfaat yang dihasilkan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sampai dengan setingkat unit eselon II wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) setelah tahun anggaran berakhir, paling lambat tanggal 31 Maret.



Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

B. Kedudukan, Kewenangan dan Tugas Pokok Serta Struktur Organisasi

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang lebih menekankan pada aspek desentralisasi yang diberikan dalam wujud otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab.

Berkaitan dengan otonomi daerah dalam pelaksanaannya di Kabupaten Barito Selatan dapat dijelaskan melalui 2 (dua) aspek, yaitu :

1. Aspek Politik

Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Kabupaten Barito Selatan dari aspek politik ditandai dengan keberadaan dan kegiatan partai politik tingkat daerah dan DPRD sebagai mitra pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.



Sementara itu di tingkat desa telah terbentuk dan berfungsinya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di semua desa sebagai pelaksanaan daripada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Demikian pula peran serta anggota BPD merupakan bukti pelaksanaan otonomi daerah dari aspek politik dapat berjalan dengan baik.

2. Aspek Manajemen Pemerintah

Dalam melaksanakan otonomi daerah secara administratif Pemerintah Kabupaten Barito Selatan mengawalinya dengan melakukan identifikasi kewenangan pemerintah daerah, penataan kelembagaan, penempatan personil, pengelolaan sumber keuangan daerah, pengelolaan sarana dan prasarana (aset daerah) dan manajemen pelayanan publik.

3. Kewenangan

Kewenangan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial.

4. Tugas Pokok

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat agar terwujud



masyarakat Kabupaten Barito Selatan yang madani, sejahtera lahir dan batin berlandaskan iman dan taqwa.

5. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja, sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien, dan melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

5.1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan dan dijabarkan dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah ;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas Pendidikan;
5. Dinas Kesehatan;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025

8. Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Dinas Pemadam Kebakaran;
10. Dinas Sosial;
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
12. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
13. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
14. Dinas Lingkungan Hidup;
15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
16. Dinas Perhubungan;
17. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
20. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
21. Dinas Perikanan;
22. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
23. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata;



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025

24. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi
Daerah;

25. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

26. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia;

27. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

28. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

29. Badan Pendapatan Daerah; dan

30. Kecamatan.

30.1 Kecamatan Jenamas;
Kelurahan Rantau Kujang;

30.2 Kecamatan Dusun Hilir;
Kelurahan Mangkatip;

30.3. Kecamatan Karau Kuala;
Kelurahan Bangkuang;

30.4 Kecamatan Dusun Selatan;
Kelurahan Buntok Kota;
Kelurahan Hilir Sper;
Kelurahan Jelapat;

30.5 Kecamatan Dusun Utara;
Kelurahan Pendang

30.6 Kecamatan Gunung Bintang Awai



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025

Tabel 1.1. Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan dan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
1 Sekretariat Daerah; 2 Sekretariat DPRD; 3 Inspektorat Daerah; 4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 5 Dinas Kesehatan; 6 Dinas Pendidikan; 7 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; 8 Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan; 9 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 10 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan; 11 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 12 Dinas Perhubungan;	1 Sekretariat Daerah; 2 Sekretariat DPRD; 3 Inspektorat Daerah; 4 Dinas Pendidikan; 5 Dinas Kesehatan; 6 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 7 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan; 8 Satuan Polisi Pamong Praja; 9 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; 10 Dinas Sosial; 11 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 12 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
13 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; 14 Dinas Penanaman Modal dan PTSP;	13 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 14 Dinas Lingkungan Hidup;
15 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan; 16 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 17 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;	15 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 16 Dinas Perhubungan; 17 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025

18	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;	18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;	20	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	21	Dinas Perikanan;
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;	22	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;	23	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata;
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	24	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
25	Kecamatan	25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
		26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
		27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
		28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
		29	Badan Pendapatan Daerah; dan
		30	Kecamatan.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar instansi pemerintah mampu menjawab tuntutan lingkungan yang strategi baik lokal, nasional dan global. Dengan pendekatan perencanaan yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyeleraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya.

Pelaksanaan analisis internal dan eksternal, oleh para perencana strategi dapat mendefinisikan misi organisasi untuk menggambarkan posisi saat ini. Kemudian, visi dirumuskan untuk menjabarkan kemana organisasi akan dibawa. Penjabaran dari visi dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi didalam memenuhi visi dan misinya. Pertanyaan “bagaimana kita menuju kesana” dijawab dengan merumuskan strategi pencapaian tujuan dan sasaran dalam wujud menetapkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh organisasi.

A. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022, mengamanatkan



agar Kabupaten / Kota menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 pada dasarnya adalah merupakan himpunan dari seluruh Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026. Oleh sebab itu, penyusunan RPD dan Renstra Perangkat Daerah sebaiknya harus disusun secara simultan atau bersamaan waktunya oleh segenap komponen Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan yang dijadikan tolok ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat *Dahani Dahani Tuntung Tulus*, maju, mandiri, berkualitas dengan memiliki iptek dan imtaq.

Dalam rangka mencegah terjadinya kekosongan arah kebijakan pembangunan daerah bagi daerah yang tidak memiliki Kepala Daerah dikarenakan masa jabatan berakhir, dalam hal penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya akan menjadi pedoman penyusunan Rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, yang secara implisit menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah

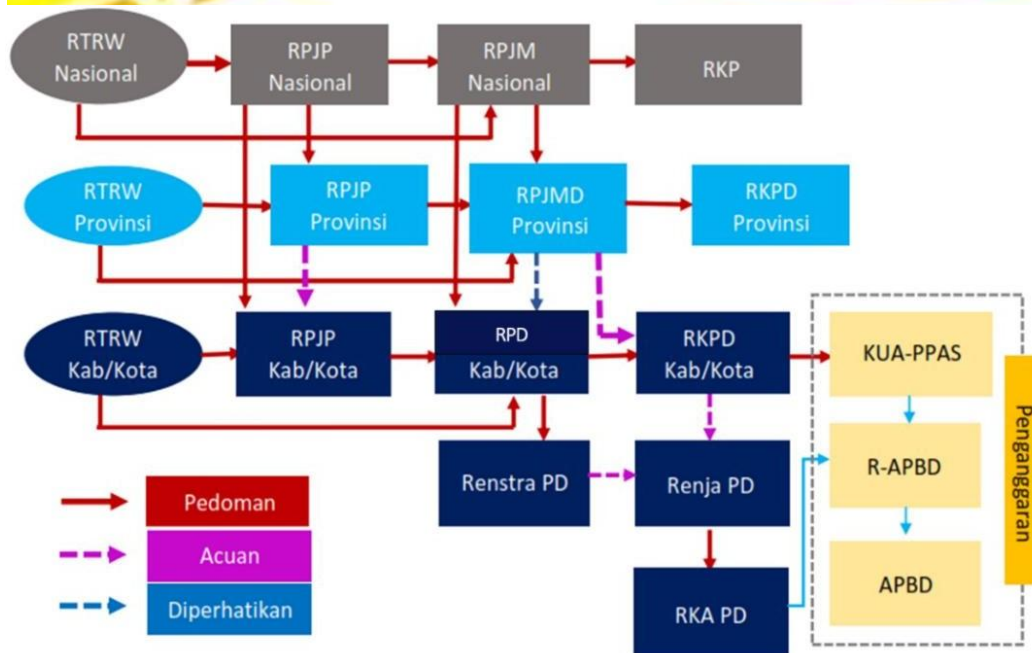


tersebut untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026.

B. Hubungan Antar Dokumen RPD

RPD memiliki hubungan/keterkaitan yang erat dengan dokumen perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dalam proses penyusunannya, RPD Kabupaten Barito Selatan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Selatan 2006-2026, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional Tahun 2011-2031, RTRW Provinsi Kalimantan Tengah 2015-2026, dan RTRW Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034, serta Rancangan Revisi RTRW Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2043. Hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 2.1
Hubungan Antar dokumen Perencanaan



Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Berdasarkan Gambar 2.1. tersebut, hubungan masing-masing dokumen perencanaan pembangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penyusunan RPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 berpedoman pada RPJMN Tahun 2020-2024 dan memperhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 dengan memperhatikan capaian target nasional terhadap target daerah. Pada tingkat *impact*, indikator kinerja sasaran RPD harus memperhatikan apa yang ingin dicapai dalam sasaran RPJMN. Pada tingkat *outcome*, prioritas pembangunan



daerah harus memperhatikan isu-isu dan strategi pembangunan nasional untuk sinkronisasi kebijakan.

2. RPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 merupakan pelaksanaan dari arah kebijakan dan sasaran RPJPD Kabupaten Barito Selatan 2023-2026, serta dalam rangka melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022.
3. RPD dan Renstra PD merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan. Sasaran RPD termasuk program prioritas akan dicapai melalui Renstra PD. Implementasi dari RPD Kabupaten Barito Selatan dituangkan dalam Renstra masing-masing PD sesuai tugas dan fungsinya.
4. RPD merupakan pedoman untuk menyusun RKPD dari tahun ketahun. Sasaran dan arah kebijakan RPD harus dipedomani dalam menentukan prioritas dan sasaran pembangunan tiap tahun dalam RKPD. Program Pembangunan daerah harus dilaksanakan melalui RKPD ke RKPD tahun berikutnya. PD menyusun program dan kegiatan prioritas tahunan dalam Renja PD.
5. RPD harus selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Hal ini dimaksudkan agar perencanaan



pembangunan selaras dengan rencana penataan ruang wilayah. Pembangunan sektoral harus dilaksanakan secara serasi dan seimbang melalui pendekatan pembangunan regional dengan memperhatikan kawasan terpilih atau strategis berdasarkan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi program pembangunan secara terpadu serta kondisi dan potensi serta pemanfaatan ruang sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

C. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, disebutkan bahwa : “Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota Tahun 2023-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota, analisa pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahap keempat, dan isu strategis aktual.”

Mengacu kepada hal tersebut di atas, maka periode Tahun 2023-2026 ini adalah merupakan periode keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Selatan 2023-2026 yang bertujuan memiliki visi untuk ***mewujudkan Barito Selatan yang Maju, Mandiri dan Profesional yang Beriman dan Bertaqwa.*** Oleh sebab itu, rumusan tujuan dan sasaran



dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026, dirumuskan dalam rangka untuk melakukan percepatan pencapaian Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026, yang diselaraskan dengan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2026.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Dalam hal ini, tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sedangkan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan.



Secara umum telah dirumuskan sebanyak 6 (enam) tujuan pembangunan dan sebanyak 15 (lima belas) sasaran pembangunan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 dengan uraian sebagai berikut:

1) ***Tujuan pertama adalah*** “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong pengembangan ekonomi kreatif serta pemerataan pembangunan melalui konektivitas antar wilayah”, terdiri dari 2 (dua) *sasaran pembangunan* yaitu :

1.1. Meningkatnya pertumbuhan sektor potensial dan industri kreatif dengan mendorong masuknya investasi daerah.

1.2. Meningkatnya konektivitas wilayah.

2) ***Tujuan kedua adalah*** “Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan”, terdiri dari 2 (dua) *sasaran pembangunan* yaitu:

2.1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

2.2. Meningkatnya fungsi tata ruang Wilayah Kabupaten.

3) ***Tujuan ketiga adalah*** “Meningkatkan tingkat kondisivitas daerah melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pengurangan kemiskinan masyarakat”, terdiri dari 4 (empat) Sasaran Pembangunan yaitu:



3.1. Meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat.

3.2. Menurunnya kemiskinan di pedesaan dan perkotaan

3.3. Meningkatnya kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

3.4. Pemenuhan pelayanan dasar perumahan, air minum dan sanitasi.

4) **Tujuan keempat adalah** “Mewujudkan peningkatan ketahanan daerah terhadap resiko ancaman bencana dan budaya serta kerentanan pangan”, terdiri dari 1 (satu) *sasaran pembangunan* yaitu :

4.1. Meningkatnya kapasitas antisipasi dan penanganan terhadap bencana, pandemi dan ketahanan pangan.

5) **Tujuan kelima adalah** “Meningkatkan sistem pemerintahan dan layanan birokrasi yang inovatif dan responsif”, terdiri dari tiga (tiga) *sasaran pembangunan* yaitu :

5.1. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel.

5.2. Meningkatnya kualitas inovasi dan pelayanan Masyarakat.

5.3. Meningkatnya pengembangan e-goverment menuju smart city.

6) **Tujuan keenam adalah** “Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia”, terdiri dari dua (dua) sasaran pembangunan yaitu :

- 6.1. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, keluarga dan ketenagakerjaan.
- 6.2. Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- 6.3. Meningkatkan kemajuan pembangunan kebudayaan.

D. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas

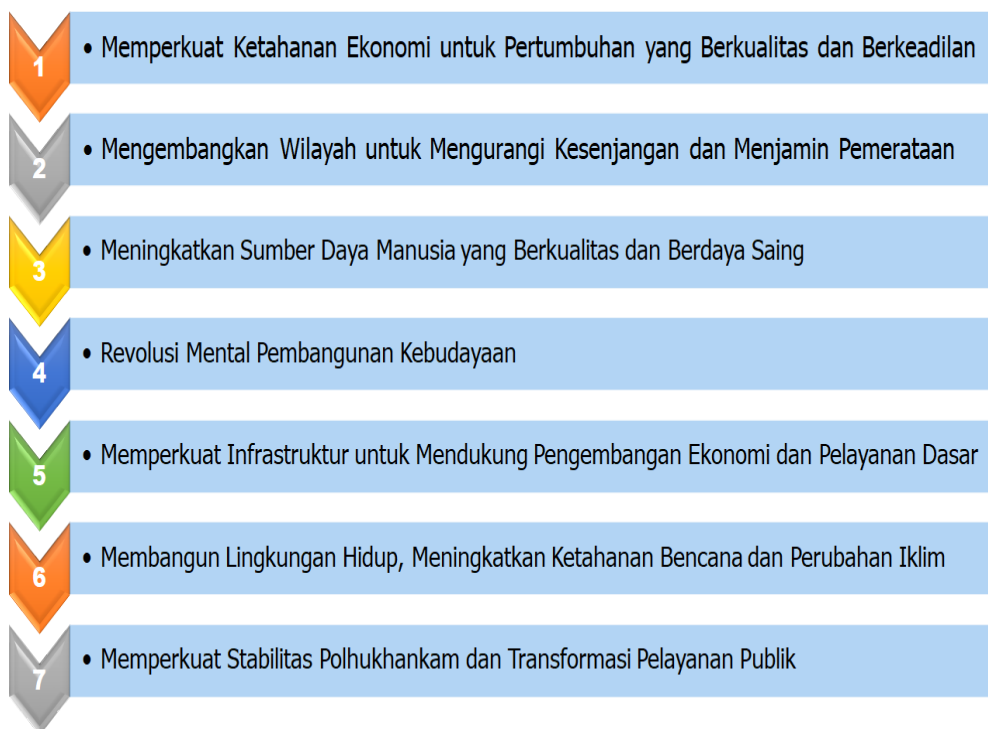
Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

Perencanaan strategi tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi Informasi.

1. Strategi Umum

Strategi umum pembangunan dalam RPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026, dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Gambar 2.2.
Strategi Umum RPD Kab. Barsel 2023-2026



Sumber : Tim Penyusun RPD

2. Strategi Berdasarkan Tujuan dan Sasaran

Strategi Berdasarkan Tujuan dan Sasaran merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPD yang akan dicapai. Rumusan Strategi Umum selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.



Tabel 2.1.
Penjabaran Tujuan dan Sasaran ke Strategi

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI
1		2		3
1.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong pengembangan ekonomi kreatif serta pemerataan pembangunan melalui konektivitas antar wilayah	1.1	Meningkatnya pertumbuhan sektor potensial dan industri kreatif dengan mendorong masuknya investasi daerah	• Peningkatan produktivitas disertai dengan Penguatan Daya Saing produk industri pengolahan • Peningkatan penggunaan teknologi industri • Peningkatan produktivitas disertai dengan penguatan daya saing produk agro dan mina industri • Peningkatan penggunaan teknologi pada agro dan mina industri • Peningkatan produksi dan produktivitas pertambangan dan penggalan yang berkelanjutan • Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan Koperasi dan UMKM (melalui Reformasi Koperasi, Pengawasan dan Transformasi UMKM informasi menjadi Formal) • Pengembangan Produk dan Pemasaran bagi Koperasi dan UMKM • Pengembangan destinasi dan promosi wisata • Peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur Pariwisata • Peningkatan Akselerasi dan integrasi industri kepariwisataan • Penciptaan iklim usaha dan investasi yang kondusif • Peningkatan kenyamanan pelayanan dan efisiensi dalam perijinan berinvestasi • Peningkatan promosi dan informasi peluang investasi
		1.2	Meningkatnya konektivitas wilayah	• Pengembangan Infrastruktur Transportasi Darat, Laut dan Udara untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah
2.	Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan	2.1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	• Penguatan Kerjasama dengan semua pihak dalam Pengarustamaan Prinsip Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan • Peningkatan upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup • Pengelolaan Sumber Daya Air



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025

		2.2	Meningkatnya fungsi tata ruang Wilayah Kabupaten	Peningkatan pembangunan wilayah yang terintegrasi dengan dokumen RTRW
3.	Meningkatkan tingkat kondisitas daerah melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pengurangan kemiskinan masyarakat	3.1	Meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat	- Menjunjung tinggi norma, agama, budaya, dan adat istiadat lokal - Edukasi dan Pencegahan Konflik Berbasis Masyarakat.
		3.2	Menurunnya kemiskinan di pedesaan dan perkotaan	- Sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan antar pusat dan daerah, antar sektor dengan lokasi dan sasaran tertentu - Meningkatkan keberlangsungan usaha mikro dan kecil dalam upaya menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan - Memperluas dan meningkatkan kualitas BUMDesa - Meningkatkan pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat desa
		3.3	Meningkatnya kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	- Mendukung sistem perlindungan sosial - dan jaminan sosial - Pengembangan dan penguatan kapasitas PMKS dalam upaya penanganan PMKS
		3.4	Pemenuhan pelayanan dasar perumahan, air minum dan sanitasi	- Pengembangan SPAM dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan air minum - Pembangunan infrastruktur sanitasi - Pengembangan dan pengembangan kawasan permukiman yang berkualitas yang mendukung peningkatan produktivitas kawasan perdesaan dan perkotaan termasuk kawasan kumuh serta pengentasan rumah tidak layak huni
4.	Mewujudkan peningkatan ketahanan daerah terhadap risiko ancaman bencana dan budaya serta kerentanan pangan	4.1	Meningkatnya kapasitas antisipasi dan penanganan terhadap bencana, pandemi dan ketahanan pangan	- Peningkatan Early Warning System, kesadaran masyarakat terhadap bencana dan penguatan kelembagaan bencana dan pandemi - Peningkatan Ketahanan Daerah menghadapi Bencana dan peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025

5.	Meningkatkan sistem pemerintahan dan layanan birokrasi yang inovatif dan responsif	5.1	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel	• Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi • Peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui optimalisasi peran pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) dan pengawasan masyarakat • Penguatan aksi anti korupsi dan pemberantasan korupsi serta memperluas secara bertahap zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) • Peningkatan Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik • Evaluasi Produk-Produk Regulasi daerah yang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan merugikan kepentingan umum serta tidak menghargai kebinekaan. • Fokus pencapaian indikator SPM bagi PD yang memiliki SPM.
		5.2	Meningkatnya kualitas inovasi dan pelayanan Masyarakat	• Peningkatan cakupan layanan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah • Peningkatan akses informasi publik yang akurat dan up to date melalui Pelayanan Informasi. • Peningkatan penanganan Complaint Handling System. • Inovasi Pelayanan Publik Berbasis TIK Untuk mewujudkan pelayanan yang Cepat, Efektif, Efisien, Responsif, Transparan, dan Akuntabel
		5.3	Meningkatnya pengembangan e-government menuju smart city	• Meningkatkan pengembangan e-government menuju smart city



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025

6.	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia	6.1	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, keluarga dan ketenagakerjaan	• Meningkatkan status kesehatan keluarga • Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan • Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu, anak dan balita • Penyediaan pelayanan Kesehatan Gratis dan Berkualitas • Perluasan akses dan Penguatan Fasilitas Kesehatan • Pemenuhan dan redistribusi tenaga kesehatan terutama di wilayah terpencil dan tertinggal. • Peningkatan RSUD Rujukan • Peningkatan akses terhadap pendidikan dasar • Peningkatan kualitas, profesionalisme, kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan • Peningkatan kualitas Manajemen Pelayanan Pendidikan • Peningkatan mutu teknologi informasi dan komunikasi pendidikan • Peningkatan rata-rata lama sekolah • Peningkatan kualitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja • Peningkatan penempatan dan perluasan kesempatan kerja • Mengembangkan kapasitas BLK yang intensif
		6.2	Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	• Pengarusutamaan gender • Peningkatan kualitas hidup perempuan
		6.3	Meningkatkan pemajuan pembangunan kebudayaan	• Revitalisasi nilai-nilai seni dan budaya lokal.

E. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan keputusan dari *stakeholder* sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu pelaksanaan RPD. Arah kebijakan RPD merupakan pedoman untuk

menentukan tahapan dan prioritas pembangunan guna mencapai sasaran RPD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan namun tetap selaras dengan pengaturan waktu. Penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran dalam RPD.

Di samping itu, arah kebijakan juga dimaksudkan untuk memberikan jawaban atas permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan kewilayahan. Analisis permasalahan dan isu-isu strategis kewilayahan akan menjadi basis utama rumusan arah kebijakan pembangunan kewilayahan untuk memberikan prioritas terkait pemerataan pembangunan dan penciptaan daerah-daerah unggulan. Untuk selanjutnya, fokus kebijakan kewilayahan harus dipedomani bersama antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten termasuk PD yang terlibat di dalamnya.

Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk memberi arah pembangunan tahunan pada RPD di buat Fokus Tema Pembangunan Kabupaten Barito Selatan, untuk masing-masing Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dari Tahun 2023 sampai Tahun 2026 sebagai berikut :

Gambar 2.3. Tema Pembangunan 2023-2026



Berdasarkan gambar di atas, dapat dipahami bahwa setiap tahun telah ditetapkan Tema-tema Pembangunan yang menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023-2026 yaitu sebagai berikut :

1.1 Tema Pembangunan pada Tahun 2023 :

“Pengembangan Ekonomi Daerah melalui optimalisasi sumberdaya lokal disertai peningkatan kualitas jaringan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia yang handal”.

1.2 Tema Pembangunan pada Tahun 2024 :



“Mendorong terwujudnya iklim investasi daerah yang kondusif, disertai dengan pemantapan pembangunan jaringan infrastruktur utk peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan”.

1.3 Tema Pembangunan pada Tahun 2025 :\

“Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas untuk pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan dan membuka kesempatan kerja yang luas”.

1.4 Tema Pembangunan pada Tahun 2026 :

“Peningkatan kesejahteraan, keadilan, dan keharmonisan masyarakat, serta pengelolaan lingkungan hidup menuju Barito Selatan Dahani Dahanai Tuntung Tulus”.

F. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Indikator kinerja yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Sementara dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang

diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan pembangunan Pemerintah Daerah. Pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam pelaksanaan pembangunan daerah dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan kesepakatan bersama namun tetap berlandaskan tujuan dan sasaran RPD.

Penetapan Indikator Kinerja Utama merupakan syarat mutlak untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari rencana pembangunan tahunan daerah karena rencana kinerja merupakan gambaran maupun potret pembangunan Kabupaten Barito Selatan di masa kini maupun yang akan datang.

Penetapan Indikator Kinerja Daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Barito Selatan tahun 2023-2026 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan



menjadi Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD).
IKU diambil dari indikator tujuan RPD, sedangkan IKPD
merupakan indikator sasaran dari RPD.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2023-2026 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja yang dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Lebih lanjut data dan informasi juga berguna sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini (*early warning*) terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan, membuat tindakan korektif secara dini, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang

telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) berpedoman pada :

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

IKU (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi tolok ukur adalah diambil dari indikator sasaran strategi yang telah ditetapkan. Keberhasilan atau pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah dengan dukungan dari



sasaran dan program yang dapat diwujudkan dan diukur untuk mencapai keberhasilan tersebut. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Barito Selatan sesuai dengan penjabaran dalam RPD Tahun 2023-2026.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 188.45/308/2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Bupati Barito Selatan.

Tabel 2.2.
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan



2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan target-target kinerja yang digambarkan dengan capaian suatu indikator kinerja Keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran dan tujuan dinilai melalui pengukuran pencapaian indikator kinerjanya.

Merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Salah satu upaya untuk mewujudkan adanya pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel adalah melalui penguatan akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah. Dalam hal ini upaya penguatan akuntabilitas kinerja salah satu caranya dapat dilakukan dengan penyusunan dokumen perjanjian kinerja atau kontrak kinerja. Mekanisme penyusunan dan penggunaan kontrak kinerja / perjanjian kinerja ini berpedoman pada ***Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Tata Cara Reviu***



Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang diharapkan akan dapat menguatkan komitmen para pemimpin instansi dan unit kerjanya dalam pencapaian target-target kinerja yang telah direncanakan sebelumnya.

Sebagai tindak lanjut dari **Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah** serta **Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**. Maka Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Perjanjian Kinerja
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET TAHUN 2025
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya pertumbuhan sektor potensial dan ekonomi kreatif serta mendorong masuknya investasi daerah.	1. Tingkat Inflasi. 2. PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 3. PDRB per Kapita.	Persen Milyar Rupiah Juta	2-4 89,8 61,08
2.	Meningkatnya konektivitas wilayah.	1. Persentase jalan dalam kondisi mantap. 2. Persentase jembatan dalam kondisi baik. 3. Persentase layanan angkutan darat dan sungai.	Persen Persen Persen	38,53 56 50



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024

3.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).	Indeks	76,74
4.	Meningkatnya fungsi tata ruang Wilayah Kabupaten.	Ketaatan terhadap RTRW.	Persen	75
5.	Meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat.	1. Persentase gangguan ketertiban umum yang ditangani 2. Persentase Penegakan PERDA	Persen Persen	95 95
6.	Menurunnya kemiskinan di pedesaan dan perkotaan.	1. Angka Kemiskinan Daerah 2. Angka Kemiskinan Ekstrem 3. Indeks Desa Membangun	Persen Persen Indeks	4,6 0,19 0,71421 (Berkembang)
7.	Meningkatnya kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	Persentase PMKS yang Mandiri.	Persen	80
8.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dasar permukiman masyarakat.	1. Persentase Penduduk Berakses Air Minum / Air Bersih. 2. Rasio Rumah Layak Huni. 3. Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani. 4. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi. 5. Persentase Drainase dalam kondisi baik.	Persen Nilai Rasio Persen Persen	53,35 0,193 0,15 67,73 70,59
9.	Meningkatnya kapasitas antisipasi dan penanganan terhadap bencana dan pandemi.	Indeks Resiko Bencana.	Angka	120,40



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024

10.	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi.	Persen	79
11.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan 1 yang akuntabel.	1. Opini BPK. 2. Indeks Pencegahan Korupsi/ Monitoring Control for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 3. Nilai SAKIP. 4. Nilai LPPD. 5. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.	Predikat Indeks Kriteria Kriteria Persen	WTP 80 B Sedang 6
12.	Meningkatnya kualitas inovasi dan pelayanan Masyarakat.	1. Indeks Inovasi Daerah pada penilaian IGA. 2. Indeks Kepuasan Masyarakat.	Predikat Persen	Inovatif 80
13.	Meningkatnya Pengembangan e-government menuju smart city.	Indeks SPBE.	Indeks	2,80
14.	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat.	Indeks pembangunan keluarga (ibangga)	Indeks	59
15.	Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks/ Persen	93,39



3. Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Pembangunan (IKP) Kabupaten Barito Selatan

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan Tujuan dan Sasaran RPD kabupaten Barito Selatan tahun 2023-2026 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKD). IKU diambil dari indikator tujuan RPD, sedangkan IKD merupakan indikator sasaran dari RPD.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2023-2026 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja yang dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Lebih lanjut data dan informasi juga berguna



sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini (early warning) terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan, membuat tindakan korektif secara dini, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik.

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026, Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang menjadi tolok ukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPD sebagaimana tabel-tabel dibawah ini :



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 308 / 2023**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BUPATI BARITO SELATAN
BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Bupati Barito Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026;
13. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Indikator Kinerja Utama Bupati Barito Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Bupati Barito Selatan dalam menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal **30** Agustus 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 308 /2023
TANGGAL : 30 Agustus 2023
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BUPATI BARITO SELATAN.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya pertumbuhan sektor potensial dan ekonomi kreatif serta mendorong masuknya investasi daerah.	1. Tingkat Inflasi.	Tingkat Inflasi diukur dengan IHK (Indeks Harga Konsumen). Pengukuran Tingkat Inflasi Kab. Barito Selatan Mengikuti tingkat Inflasi Kota Palangka Raya, karena Palangka Raya merupakan kota IHK (Indeks Harga Konsumen) terdekat dengan Kabupaten Barito Selatan. Pada Kabupaten Barito Selatan merupakan kota IPH (Indeks Pergerakan Harga) datanya diambil dari aplikasi SP2KP (Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok) yang setiap hari diupdate perubahan harga 20 komoditi maksimal pukul 15.00 WIB pada hari Kerja melalui Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah.	1. BPS 2. Tim Pengendalian Inflasi Daerah	1. SETDA 2. DISDAGKOP UKM 3. DKPPP
		2. PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan.	PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Tahun dasar tersebut umumnya ditetapkan selama periode 10 (sepuluh) tahunan. Penentuan PDRB atas harga konstan, biasanya diperlukan untuk mengeluarkan pengaruh inflasi/deflasi akibat fluktuasi harga barang.	BPS	1. DISDAGKOP UKM 2. DKPPP

NO.	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
			Formulasi : $\frac{\text{Target Tahun/Capaian}}{\text{Target Awal}} \times 100$		
		3. PDRB perkapita.	PDB per kapita dapat dikatakan sebagai ukuran output ekonomi suatu negara yang memperhitungkan jumlah penduduknya yaitu hitungan orang. Rumus tersebut membagi produk domestik bruto suatu negara yaitu PDB dengan jumlah penduduknya, singkatnya, total penduduk negara tersebut. Formulasi : $\frac{\text{Target Tahun/Capaian}}{\text{Target Awal}} \times 100$	BPS	1. DISDAGKOP UKM 2. DKPPP
2.	Meningkatnya konektivitas wilayah.	1. Persentase jalan dalam kondisi mantap.	Perhitungan nilai IRI dan SDI dengan mengacu pada kategori dan bentuk kerusakan jalan. Pengukuran yang dilakukan dilapangan kemudian dicari nilai rerata yang sebelumnya rute-rute yang ada dibagi ke dalam beberapa segmen. Sebelum memperoleh nilai IRI, maka dilakukan penilaian kondisi jalan menggunakan Road Condition Index (RCI) atau indeks kondisi kekasaran jalan, dimana survey dilakukan secara pengamatan atau visualisasi terhadap ruas jalan. Selain memperhatikan kondisi perkerasan, RCI juga memperhatikan kondisi dari jenis permukaannya. Setelah didapat nilai rerata maka nilai tersebut dihubungkan kedalam empat unsur yang dipergunakan.	BAPPEDA	DPUPR

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
			Sebagai penilaian untuk menghitung besaran nilai SDI yaitu: persentase penilaian luas retakan, penilaian lebar retakan, penilaian jumlah lubang, dan penilaian kedalaman rutting bekas roda. Perbandingan panjang jalan Kabupaten kondisi baik dengan total panjang jalan Kabupaten (SK jalan Kabupaten) x 100 %		
		2. Persentase jembatan dalam kondisi baik.	Perhitungan nilai IRI dan SDI dengan mengacu pada kategori dan bentuk kerusakan jalan. Pengukuran yang dilakukan dilapangan kemudian dicari nilai rerata yang sebelumnya rute-rute yang ada dibagi ke dalam beberapa segmen. Sebelum memperoleh nilai IRI, maka dilakukan penilaian kondisi jalan menggunakan Road Condition Index (RCI) atau indeks kondisi kekasaran jalan, dimana survey dilakukan secara pengamatan atau visualisasi terhadap ruas jalan. Selain memperhatikan kondisi perkerasan, RCI juga memperhatikan kondisi dari jenis permukaannya. Setelah didapat nilai rerata maka nilai tersebut dihubungkan ke dalam empat unsur yang dipergunakan sebagai penilaian untuk menghitung besaran nilai SDI yaitu; persentase penilaian luas retakan, penilaian lebar retak, penilaian jumlah lubang, dan penilaian kedalaman rutting bekas roda. Perbandingan panjang jembatan Kabupaten kondisi baik dengan total panjang jembatan kabupaten x 100%. Formulasi : $\frac{\text{panjang jembatan Kabupaten kondisi baik}}{\text{Total panjang jembatan Kabupaten}} \times 100\%$	DPUPR	DPUPR

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		3. Persentase layanan angkutan darat dan Sungai.	Perbandingan jumlah Angkutan Darat dibagi dengan jumlah penumpang angkutan darat x 100% Formulasi : $\frac{\text{Jumlah Angkutan Darat}}{\text{Jumlah Penumpang Angkutan Darat}} \times 100\%$ Perbandingan jumlah angkutan Sungai dibagi dengan jumlah penumpang angkutan Sungai x 100% Formulasi : $\frac{\text{Jumlah Angkutan sungai}}{\text{Jumlah Penumpang Angkutan sungai}} \times 100\%$	DISHUB	DISHUB
3.	Meningkatnya kualitas lingkungan Hidup.	Indeks Kualitas Lingkungan (IKL).	Indeks Kualitas Lingkungan (IKL) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKL dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup dan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Cara Perhitungan Indikator : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten $\text{IKL} = (0.376 \times \text{IKA}) + (0.405 \times \text{IKU})$	DLH	DLH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
4.	Meningkatnya fungsi tata ruang Wilayah Kabupaten	Ketaatan terhadap RTRW.	Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola. pemanfaatan ruang wilayah. Perbandingan luas pemanfaatan ruang sesuai RTRWK dengan luas RTRWK X 100%. Perbandingan luas tanah yang sudah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dibagi jumlah luas wilayah dikali 100%.	BAPPEDA	1. DPUPR 2. DISPERKIMTAN
5.	Meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat.	1. Persentase gangguan ketertiban umum yang ditangani.	Presentase jumlah cakupan pelayanan Trantibumlinmas, penegakan Peraturan Daerah dan koordinasi kebakaran dibagi jumlah Peraturan Daerah. Perbandingan jumlah kegiatan yang terlaksana dengan jumlah kegiatan yang direncanakan x 100% Formulasi : $\frac{\text{Jumlah Kegiatan Yang Terlaksana}}{\text{Jumlah Kegiatan yang direncanakan}} \times 100\%$ Perbandingan jumlah gangguan ketertiban umum yang tertangani pada tahun N dengan jumlah gangguan ketertiban umum yang terdata oada tahun N X 100% Formulasi : $\frac{\text{Jumlah gangguan ketertiban umum yang tertangani Tahun N}}{\text{Jumlah gangguan ketertiban umum yang terdata Tahun N}} \times 100\%$	SELURUH KECAMATAN	1. SATPOLPP DAMKAR 2. KESBANGPOL 3. Seluruh Kecamatan

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		2. Persentase Penegakan PERDA.	Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat + 20% persentase peningkatan kapasitas Pol PP + 20% Persentase kampung yang mengimplementasikan Peraturan Daerah	SATPOLPP DAMKAR	1. SATPOLPP DAMKAR
6.	Menurunnya Kemiskinan di Pedesaan dan Perkotaan.	1. Angka Kemiskinan Daerah.	Head Count Index (HCI-P0) adalah persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK). Jumlah Masyarakat miskin dibagi jumlah penduduk. $P_{\alpha=n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^\alpha$ Dimana : α = 0 z = garis kemiskinan. y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i=1, 2, 3, , q), $y_i < z$ q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. n = jumlah penduduk.	BPS	DINSOSPMD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		1. Angka Kemiskinan Ekstrim.	Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial. Perhitungan jumlah dan angka miskin ekstrem dihitung oleh BPS setiap tahunnya dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Jumlah kemiskinan Ekstrim dibagi jumlah penduduk.	BPS	DINSOSPMD
		2. Indeks Desa Membangun.	IDM merupakan indeks komposit yang dibangun dari dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan. Ketiga dimensi terdiri dari variabel, dan setiap variabel diturunkan menjadi indikator operasional. Setiap indikator memiliki skor antara 0 s.d. 5; semakin tinggi skor mencerminkan tingkat keberartian. Misalnya : skor untuk indikator akses terhadap pendidikan sekolah dasar; bila Desa A memiliki akses fisik ≤ 3 Km, maka Desa A memiliki skor 5, dan Desa B memiliki akses fisik > 10 Km, maka memiliki skor 1. Ini berarti penduduk Desa A memiliki akses yang lebih baik dibandingkan dengan penduduk Desa B. Jumlah desa berkembang dibagi dengan jumlah desa. Formulasi : Indeks Varibel= $(\sum \text{IndikatorX}) / (\text{Nilai Maksimum (X)})$	SELURUH KECAMATAN	DINSOSPMD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
7.	Meningkatnya kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	Persentase PMKS yang Mandiri.	PMKS terdiri dari 26 item (Bayi terlantar, Anak cacat, anak yang berhadapan dengan hukum, Anak korban kekerasan, Lanjut Usia Terlantar, Penyandang disabilitas, Tuna Susila, Gelandangan Pengemis, Orang dengan HIV AIDS, korban kekerasan NAFZA, Korban bencana alam, korban bencana sosial). Formulasi : $\frac{\sum \text{PMKS (n-1)} - \sum \text{PMKS (n-)}}{\sum \text{PMKS}} \times 100$	DINSOSPMD	1. SETDA 2. DINSOSPMD
8.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dasar permukiman masyarakat.	1. Persentase Penduduk Berakses Air Minum / Air Bersih.	Perbandingan jumlah rumah tangga yang memiliki akses air minum yang layak dengan jumlah total rumah tangga diseluruh Kabupaten x 100% Formulasi : $\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih}}{\text{Jumlah Seluruh Rumah Tangga}} \times 100\%$	1. BPS 2. DPUPR	DPUPR
		2. Rasio Rumah Layak Huni.	Perbandingan antara jumlah rumah layak huni terhadap jumlah penduduk . Formulasi : $\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$	BAPPEDA	DISPERKIMTAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		3. Persentase kawasan permukiman kumuh yang Tertanggung.	Perbandingan luas kawasan kumuh yang tertangani di bagi luas kawasan kumuh keseluruhan di kali 100% Formulasi : $\frac{\text{Jumlah luas kawasan kumuh yang tertangani}}{\text{jumlah luas kawasan kumuh keseluruhan}} \times 100\%$	DISPERKIMTAN	1. DPUPR 2. DISPERKIMTAN
		4. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi.	Perbandingan rumah tangga yang memiliki akses sanitasi yang layak dengan jumlah total rumah tangga di keseluruhan Kabupaten x 100% Formulasi : $\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Mengakses Sanitasi}}{\text{Jumlah Seluruh Rumah Tangga}} \times 100\%$	DPUPR	DPUPR
		5. Persentase Drainase dalam kondisi baik.	Perbandingan luas irigasi kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik dibagi dengan luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten x 100% Formulasi : $\frac{\text{Jumlah luas Drainase dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah luas drainase di daerah tersebut}} \times 100\%$	DPUPR	DPUPR
9.	Meningkatnya kapasitas antisipasi dan penanganan terhadap bencana dan pandemi.	Indeks Resiko Bencana.	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) ini dihitung berdasarkan rumus berikut : $\text{Risk} = \text{Hazard} \times \frac{\text{Vulnerability}}{\text{capacity}}$ Di mana hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir,		

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
			letusan gunung api, dan lainnya. Vulnerability (kerentanan) dihitung berdasarkan para-meter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Capacity (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: 1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; 2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; 3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; 4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; 5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; 6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan 7) Pengembangan sistem pemulihan bencana.	BPBD	BPBD
10.	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi.	Nilai PPH merupakan total jumlah dari 9 kelompok pangan di konsumsi penduduk yang beragam, bergizi dan seimbang.	DKPPP	DKPPP
11.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntanbel.	1. Opini BPK.	Opini dihasilkan dari pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa pada kriteria yaitu: 1) Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; 2) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures); 3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; 4) efektivitas sistem pengendalian intern.	1. BPKAD 2. BPK	1. BPKAD 2. BAPPEDA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		2. Indeks Pencegahan Korupsi / Monitoring Control for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).	MCP merupakan sebuah aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi.	1. KPK 2. Inspektorat Daerah	1. BPKAD 2. INSPEKTORAT DAERAH 3. BKPSDM 4. BAPPEDA 5. DPUPR 6. SETDA 7. DINSOSPMD 8. DPMPTSP
		3. Nilai SAKIP.	Nilai dari aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan tata Kelola pemerintahan yang akuntabel sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP; PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis penyusunan laporan kinerja, perjanjian kinerja serta tata cara review terhadap laporan kinerja. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor B/693/AA.05/2022 tanggal 20 Juli 2022 tentang Permintaan Data Dukung dan Matrik Tindak Lanjut untuk Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).	1. KEMENPANRB 2. Bagian Organisasi SETDA	SELURUH OPD
		4. Nilai LPPD.	LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 Tahun, Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) berdasarkan format yang	3.	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
			ditetapkan oleh Menteri.Penyusunan LPPD mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan pemerintah daerah. Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri. Data yang dituangkan dalam LPPD wajib diverifikasi dan dinilai oleh Inspektorat Daerah yang bersangkutan.	1. KEMENDAGRI 2. Bagian Pemerintahan SETDA	SETDA
		5. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.	Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mangandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Formulasi : Rasio PAD terhadap total pendapatan Daerah $\frac{\text{Total PAD}}{\text{Total pendapatan Daerah}} \times 100\%$	BPKAD	BPKAD
12.	Meningkatnya kualitas inovasi dan pelayanan Masyarakat.	1. Indeks Inovasi Daerah pada Penilaian IGA.	Himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, didasarkan urusan dan kewenangan suatu Pemerintahan Daerah pada setiap tingkatannya.	BAPPEDA	BAPPEDA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
			Skor total Inovasi Daerah : $= \sum_{j=1}^{16} \text{Skor ISP} + \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^{36} \text{Skor SID ke } i \text{ Inovasi ke } j$ Indeks Inovasi Daerah (IID): $IID = \frac{\text{Skor Total}}{\text{Skor Total Maksimum}} \times 100$ Keterangan : - ISP = Indikator Satuan Pemda - SID = Satuan Inovasi Daerah - Σ = Jumlah - N = Jumlah inovasi pemda - I = Nomor indikator - J = Nomor inovasi		
		2.Indeks Kepuasan Masyarakat.	Nilai IKM dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut: $\text{Bobot Nilai Tertimbang} = \frac{\text{jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}}$	1. DISDUKCATPIL 2. DPMPTSP 3. Seluruh Kecamatan	1. DISDUKCAPIL 2. DPMPTSP 3. Seluruh Kecamatan
13.	Meningkatnya Pengembangan e-government menuju smart	Indeks SPBE.	Perhitungan SPBE dilakukan pada tautan tauval spbe.go.id dengan menyampaikan bukti dan penjelasan pelaksanaan SPBE pada 47 Indikator. Hasil Evaluasi Indeks SPBE oleh Kemenpan RB dan Nilai masing -	KEMENPANRB	DISKOMINFO

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
	city.		masing Domain hasil Evaluasi Mandiri indeks SPBE oleh Kemenpan RB.		
14.	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat.	1.Indeks pembangunan keluarga (ibangga).	Kemajuan Pembangunan keluarga dapat diukur melalui indeks Pembangunan keluarga (iBangga), yang terdiri dari 3 (tiga) dimensi, yakni ; ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan. Hasil dari indeks tersebut digunakan untuk mengklasifikasikan status Pembangunan keluarga melalui kategori Tangguh, berkembang atau rentan. Nilai komposit dari 3 dimensi dengan mempertimbangkan bobot tertentu, (a) Dimensi Ketentraman dengan indikator antara lain (1) kegiatan ibadah; (2) legalitas keluarga; (3) jaminan kesehatan; (4) jaminan keuangan; (5) keharmonisan keluarga; (b) Dimensi Kemandirian dengan indikator antara lain (1) pemenuhan kebutuhan dasar; (2) keberlangsungan pendidikan; (3) kesehatan keluarga; (4) akses informasi; (c) Dimensi Kebahagiaan dengan indikator antara lain (1) interaksi keluarga; (2) interaksi social. Formula iBangga: iBangga = $\frac{1}{3}$ (Indeks Ketentraman + Indeks Kemandirian + Indeks Kebahagiaan) x 100	DPPKBP3A	DPPKBP3A

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		2. Angka Harapan Hidup (AHH)	Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata usia yang diperkirakan pada seseorang atas dasar angka kematian pada masa tersebut yang cenderung tidak berubah pada masa tersebut yang cenderung tidak berubah dimasa mendatang. Angka harapan hidup merupakan sarana evaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya. Dengan evaluasi tersebut pemerintah Kabupaten Barito Selatan dapat meningkatkan derajat Kesehatan bagi para penduduknya.	BPS	Dinas Kesehatan
		3. Rata - rata lama sekolah (RLS)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Formulasi: $RLS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ RLS = rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas X_i = lama sekolah penduduk ke-I yang berusia 15 tahun n = jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas	BPS	Dinas Pendidikan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
15.	Meningkatnya pengarusutaman gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung Gender Development Index (GDI) dan Human Development Indeks (HDI) pada tahun 2010. Untuk menghitung IPG perlu menghitung IPM laki-laki dan perempuan. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: (i) Kesehatan, (ii) Pendidikan, dan (iii) Ekonomi. Formula IPG : $IPG = \frac{IMP \text{ Perempuan}}{IMP \text{ Laki-laki}}$	BPS	DPPKBP3A
16.	Meningkatnya pembangunan kebudayaan.	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan.	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan $\times 100\%$ Total benda, situs dan kawasan budaya yang dimiliki daerah Persentase jumlah benda, situs dan kawasan cagar alam yang dilestarikan terhadap total benda.	DISPOPARBUD	DISPORAPARBUD


Pj. BUPATI BARITO SELATAN,
DEDDY WINARWAN



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025

Tabel 2.4. Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026

No.	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2022)	TARGET TAHUN				KONDISI AKHIR (2026)
			2023	2024	2025	2026	
1	Tingkat Inflasi	2-4 Persen	2-4 Persen	2-4 Persen	2-4 Persen	2-4 Persen	2-4 Persen
2	PDRB Per Kapita	58,82 Juta	59,25 Juta	60,14 Juta	61,08 Juta	61,97 Juta	061,97 Juta
3	PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum	82,8 Milyar Rupiah	85,8 Milyar Rupiah	87,8 Milyar Rupiah	89,8 Milyar Rupiah	90,8 Milyar Rupiah	70,8 Milyar Rupiah
4	Nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	593 Milyar Rupiah	611 Milyar Rupiah	629 Milyar Rupiah	647 Milyar Rupiah	665 Milyar Rupiah	665 Milyar Rupiah
5	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi mantap	52,22 Persen	53,25 Persen	54,39 Persen	55,58 Persen	56,81 Persen	56,81 Persen
6	Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	48,50 Persen	49,42 Persen	50,54 Persen	51,80 Persen	53,15 Persen	53,15 Persen
7	Angka Kecelakaan Lalu Lintas	119 jumlah	110 jumlah	102 jumlah	92 jumlah	83 jumlah	83 jumlah
8	Persentase Layanan Angkutan Darat dan Sungai	47,00 Persen	50,00 Persen	55,00 Persen	60,00 Persen	65,00 Persen	65,00 Persen
9	Indeks Kualitas Air (IKA)	52,70	52,80	52,90	53,00	53,10	53,10
10	Indeks Kualitas Udara (IKU)	90,53	90,64	90,75	90,86	90,87	90,87
11	Indeks Kualitas Lingkungan (IKL)	73,78	74,62	75,46	76,30	77,14	77,14
12	Timbunan Sampah yang Ditangani	55,00	60,00	65,00	70,00	70,00	70,00



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025

No.	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2022)	TARGET TAHUN				KONDISI AKHIR (2026)
			2023	2024	2025	2026	
13	Ketaatan Terhadap RTRW	95 Persen	96 Persen	97 Persen	98 Persen	99 Persen	99 Persen
14	Angka Kriminalitas yang Tertangani	5,13 Permiriad (persepuluhribu)	4,92 Permiriad (persepuluhribu)	4,81 Permiriad (persepuluhribu)	4,29 Permiriad (persepuluhribu)	3,69 Permiriad (persepuluhribu)	3,69 Permiriad (persepuluhribu)
15	Persentase gangguan keteriban umum yang ditangani	80 Persen	85 Persen	90 Persen	95 Persen	100 Persen	100 Persen
16	Capaian Pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP Aktif (Persen)	75 Persen	75 Persen	75 Persen	75 Persen	75 Persen	75 Persen
17	Tingkat Pengangguran	5,09 Persen	5,01 Persen	4,93 Persen	4,86 Persen	4,81 Persen	4,81 Persen
18	Persentase PMKS yang Tertangani	75,05 Persen	80,05 Persen	85,05 Persen	90,05 Persen	95,05 Persen	95,05 Persen
19	Persentase Penduduk Berakses Air Minum / Air Bersih	37,76 Persen	42,76 Persen	47,76 Persen	52,76 Persen	57,76 Persen	57,76 Persen
20	Rasio Rumah Layak Huni	19,00 Persen	19,01 Persen	19,02 Persen	19,03 Persen	19,04 Persen	19,04 Persen
21	Persentase Areal Kawasan Kumuh	0,30 Persen	0,23 Persen	0,15 Persen	0,08 Persen	0,00 Persen	0,00 Persen
22	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	83,15 Persen	87,15 Persen	91,15 Persen	94,15 Persen	96,15 Persen	96,15 Persen
23	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik / Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	64,59 Persen	66,59 Persen	68,59 Persen	70,59 Persen	72,59 Persen	72,59 Persen
24	Cakupan Pelayanan Bencana	29,41 Persen	47,06 Persen	64,71 Persen	82,35 Persen	100,00 Persen	100,00 Persen
25	Persentase Penurunan Jumlah Titik Api (Hot Spot)	100,00 Persen	100,00 Persen	100,00 Persen	100,00 Persen	100,00 Persen	100,00 Persen



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025

No.	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2022)	TARGET TAHUN				KONDISI AKHIR (2026)
			2023	2024	2025	2026	
26	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	90 Persen	92 Persen	95 Persen	97 Persen	100 Persen	100 Persen
27	Opini BPK	WTP Kriteria	WTP Kriteria	WTP Kriteria	WTP Kriteria	WTP Kriteria	WTP Kriteria
28	Indeks Pencegahan Korupsi / Monitoring Control For Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	70,23 Indeks	71,55 Indeks	72,92 Indeks	74,35 Indeks	75,18 Indeks	75,18 Indeks
29	Nilai SAKIP	CC Kriteria	B Kriteria	B Kriteria	B Kriteria	BB Kriteria	BB Kriteria
30	Nilai LPPD	Tinggi Kriteria	Sangat Tinggi Kriteria	Sangat Tinggi Kriteria	Sangat Tinggi Kriteria	Sangat Tinggi Kriteria	Sangat Tinggi Kriteria
31	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	5,75 Persen	6,00 Persen	6,50 Persen	7,00 Persen	7,50 Persen	7,50 Persen
32	Persentase Kesesuaian antar Dokumen Perencanaan Daerah	95 Persen	96 Persen	97 Persen	98 Persen	99 Persen	99 Persen
33	Indeks Desa Membangun	0,6522(berkembang) Indeks	0,6722(berkembang) Indeks	0,6822(berkembang) Indeks	0,6922(berkembang) Indeks	0,7082(maju) Indeks	0,7082(maju) Indeks
34	Rasio Penduduk ber-KTP	90 Persen	92 Persen	95 Persen	97 Persen	100 Persen	100 Persen
35	Jumlah Kajian Kelitbangan	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	2 Kajian	2 Kajian
36	Indeks SPBE	2,20 Indeks	2,50 Indeks	2,80 Indeks	3,00 Indeks	3,20 Indeks	3,20 Indeks
37	Rata-rata Lama Sekolah	8,95 Tahun	9,05	9,15 Tahun	9,25 Tahun	9,35 Tahun	9,35 Tahun
38	Harapan Lama Sekolah	12,66 Tahun	12,77 Tahun	12,88 Tahun	12,99 Tahun	13,11 Tahun	13,11 Tahun
39	Umur Harapan Hidup	67,19 Tahun	67,29 Tahun	67,39 Tahun	67,49 Tahun	67,59 Tahun	67,59 Tahun
40	Produktivitas Total Daerah	127,43 juta rupiah	129,34 juta rupiah	131,28 juta rupiah	133,24 juta rupiah	135,24 juta rupiah	135,24 juta rupiah



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025

No.	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2022)	TARGET TAHUN				KONDISI AKHIR (2026)
			2023	2024	2025	2026	
41	Persentase Wirausaha Muda	37,00 Persen	41,00 Persen	45,00 Persen	48,00 Persen	51,00 Persen	51,00 Persen
42	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	32,20 Indeks	33,36 Indeks	34,45 Indeks	35,58 Indeks	36,30 Indeks	36,30 Indeks
43	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,78 (%)	91,80 Persen (%)	91,82 Persen (%)	91,84 Persen (%)	91,86 Persen (%)	91,86 Persen (%)
44	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	8,00 Festival	10,00 Festival	12,00 Festival	14,00 Festival	16,00 Festival	16,00 Festival
45	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	22,56 Persen	23,53 Persen	25,71 Persen	27,78 Persen	27,78 Persen	27,78 Persen



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025

Tabel 2.5. Indikator Kinerja Pembangunan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA				KONDISI AKHIR (2026)
			2023	2024	2025	2026	
I.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,3	2,50	2,70	2,9	3,1	3,10
2.	Laju Inflasi (%)	3,58	3,25	3,19	3,1	3,05	3,05
3.	PDRB per Kapita (Jutaan Rp)	42.121	47.975	51.229	54.720	58.474	58.474
4.	Indeks Gini	0,278	0,273	0,270	0,268	0,265	0,265
5.	Angka Kemiskinan (%)	5,04	4,98	4,93	4,88	4,82	4,82
6.	Indeks Pembangunan Manusia	70,54	70,94	71,34	71,74	72,14	72,14
7.	Angka Pengangguran Terbuka (%)	2,12	2,08	2,04	2,00	1,92	1,92
8.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8,95	9,15	9,25	9,45	9,65	9,65
10.	Angka Harapan Lama Sekolah	12,65	12,73	12,80	12,88	12,95	12,95
11.	Angka Melek Huruf	9,75	10,00	10,25	10,50	10,75	10,75
12.	Umur Harapan Hidup	67,19	67,20	67,22	67,24	67,26	67,26
13.	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB (%)	20,72	21,06	21,41	21,75	22,10	22,10



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA				KONDISI AKHIR (2026)
			2023	2024	2025	2026	
II.	ASPEK DAYA SAING DAERAH						
1.	Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita (%)	53,55	53,88	54,22	54,56	54,89	54,89
2.	Desa Swasembada (%)	19,35	24,19	30,65	35,48	40,32	40,32
3.	Rasio Ketergantungan	43,17	43,37	43,67	43,97	44,17	44,17
III.	FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR						
A.	Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar						
1.	Pendidikan						
1.1.	Pendidikan Anak Usia Dini	69,61	73,89	78,45	83,28	88,41	88,41
1.2.	Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A	98,32	98,32	98,52	98,72	99,00	99,00
1.3.	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B	89,52	92,52	94,52	96,52	98,52	98,52
1.4.	Angka Putus Sekolah SD/MI	0,28	0,28	0,18	0,18	0,08	0,08
1.5.	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,39	0,39	0,29	0,29	0,19	0,19
1.6.	Angka Kelulusan SD/MI	100	100	100	100	100	100
1.7.	Angka Kelulusan SMP/MTs	100	100	100	100	100	100
1.8.	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	92,72	93,72	94,72	95,72	96,72	96,72
1.9.	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4	92,57	93,57	94,57	95,57	96,57	96,57



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA				KONDISI AKHIR (2026)
			2023	2024	2025	2026	
2.	Kesehatan						
2.1.	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	93,16	95,31	97,51	99,76	100	100
2.2.	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	96,57	96,77	96,98	97,19	97,40	97,40
2.3.	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100	100	100	100	100	100
2.4.	Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan	0,19	2,19	4,19	6,19	8,19	8,19
2.5.	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	57,75	59,80	61,93	64,14	66,42	66,42
2.6.	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	100	100	100	100	100	100
2.7.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	100	100	100	100	100	100
2.8.	Cakupan Kunjungan Bayi	100	100	100	100	100	100
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
3.1.	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	373,96	374,96	375,96	376,96	377,96	377,96
3.2.	Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	2035,49	2036	2036,50	2037	2037,50	2037,50
3.3.	Rumah Tangga Bersanitasi	13,38	14,38	15,38	16,38	17,38	17,38



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA				KONDISI AKHIR (2026)
			2023	2024	2025	2026	
3.4.	Kawasan Kumuh	0,20	0,20	0,15	0,15	0,10	0,10
3.5.	RTH per Satuan Luas Wilayah	25,31	25,81	26,31	26,81	27,31	27,31
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
4.1.	Rumah Tangga Penguna Air Bersih	98,50	99,00	99,50	100,00	100,00	100,00
4.2.	Luas Lingkungan Permukiman Kumuh	0,013	0,011	0,009	0,007	0,0065	0,0065
4.3.	Rumah Layak Huni	2,245	96,84	97,91	98,67	100,00	100,00
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
5.1.	Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100	100
5.2.	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan WMK	75	75	75	75	75	75
5.3.	Angka Tunawisma	0,45	0,45	0,43	0,40	0,40	0,40
5.4.	Angka Prostitusi	1,25	1,25	1,20	1,20	1,15	1,15
5.5.	Persentase Penjualan Minuman Beralkohol Tanpa Izin	1,25	1,20	1,20	1,15	1,15	0,60
5.6.	Persentase Angka Kasus Perjudian	0,70	0,68	0,66	0,60	0,60	6,65
5.7.	Persentase Angka Kasus Penggunaan Narkotika dan Barang Zat Adektif	6,75	6,70	6,68	6,65	6,65	7,00



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA				KONDISI AKHIR (2026)
			2023	2024	2025	2026	
6.	Sosial						
6.1.	Persentase Pemberdayaan Keluarga Miskin dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PMKS)	69,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.2.	Persentase Pemberdayaan Lansia Terlantar Potensial	39,00	48,00	64,00	80,00	90,00	90,00
6.3.	Persentase Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Potensial	40,00	60,00	70,00	80,00	90,00	90,00
6.4.	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial	83,17	84,31	85,27	86,52	88,17	88,17
6.5.	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.6.	Persentase RTLH Masyarakat Miskin yang ditangani	65,75	97,46	100,00	100,00	100,00	100,00
6.7.	Persentase Penyandang Cacat dan Trauma yang direhabilitasi	75,00	78,00	83,00	85,00	90,00	90,00
6.8.	Persentase Manula Potensial yang Mendapat Perlindungan	75,00	78,00	83,00	85,00	90,00	90,00
6.9.	Persentase PMKS Skala Kabupaten yang Menerima Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA				KONDISI AKHIR (2026)
			2023	2024	2025	2026	
3.4.	Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Kg)	12.000	17.000	22.000	27.000	32.000	32.000
3.5.	Pengawasan Keamanan Pangan Segar (%)	66,67	77,78	77,78	88,89	88,89	88,89
4.	Pertanahan						
4.1.	Persentase Sertifikat Lahan Pemda yang Terbit	1,017	1,117	1,217	1,317	1,417	1,417
4.2.	Persentase Izin Lokasi yang Berjalan Sesuai Aturan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.3.	Persentase Konflik Lahan yang Ditangani	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.	Lingkungan Hidup						
5.1.	Persentase Pengurangan Sampah	20,00	22,00	24,00	26,00	27,00	27,00
5.2.	Persentase Penanganan Sampah	41,28	42,44	43,62	44,84	45,13	45,13
5.3.	Indeks Kualitas Air	52,70	52,80	52,90	53,00	53,10	53,10
5.4.	Indeks Kualitas Udara	90,53	90,64	90,75	90,86	90,87	90,87
5.5.	Indeks Kualitas Lingkungan (IKL)	73,78	74,62	75,46	76,30	77,14	77,14
5.6.	Timbunan Sampah yang Ditangani	55,00	60,00	65,00	70,00	70,00	70,00
6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
6.1.	Cakupan Penerbitan Akte Perkawinan	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00	100,00
6.2.	Cakupan Penerbitan KTP	99,98	99,98	100,00	100,00	100,00	100,00
6.3.	Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran	95,03	96,03	97,03	98,03	99,03	99,03



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA				KONDISI AKHIR (2026)
			2023	2024	2025	2026	
6.4.	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.5.	Cakupan Penerbitan Akte Kematian	70,00	75,00	78,00	81,00	85,00	85,00
7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
7.1.	Persentase Lembaga Ekonomi Pedesaan yang Aktif	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.2.	Persentase Perempuan yang Aktif di Desa	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.3.	Persentase Desa Berkriteria Baik	80,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.4.	Persentase Pemerintahan Desa yang Terbina	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
8.1.	Cakupan Peserta KB Aktif (%)	69,86	70,71	71,46	72,12	73,07	73,07
8.2.	Cakupan <i>unmet need</i>	15,51	14,63	13,86	13,20	12,62	12,62
8.3.	Ratio ASFR 15-19 Tahun	48,48	48,56	48,32	48,11	47,94	47,94
9.	Perhubungan						
9.1.	Persentase Angkutan Transportasi dalam Kondisi Baik	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00
9.2.	Persentase Pengoperasian Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	65,46	65,92	66,38	66,84	67,30	67,30
9.3.	Persentase Penurunan Angka Pelanggaran Lalu Lintas	4,50	4,00	3,00	2,50	2,00	2,00



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA				KONDISI AKHIR (2026)
			2023	2024	2025	2026	
10.	Komunikasi dan Informatika						
10.1	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	80,00
11.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						
11.1.	Persentase Peningkatan Wirausaha Baru	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	70,00
11.2.	Persentase UMKM Yang Dilakukan Pembinaan Berupa Dana Yang Diakses dari Perbankan, Tingkat Penjualan, Kualitas SDM, Sistem Administrasi dan Keuangan, Jumlah Pelanggan yang dilayani	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	9,00
12.	Penanaman Modal						
12.1	Kontribusi Investasi Bidang Pariwisata terhadap Investasi Daerah	24,38	25,79	26,5	28,62	28,62	28,62
13.	Kepemudaan dan Olahraga						
13.1	Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif	60,00	60,00	60,00	60,00	75,00	75,00
13.2	Persentase Pemuda yang Aktif Berorganisasi	2,50	2,50	2,75	2,75	3,00	3,00
13.3	Persentase Pemuda yang Berwirausaha	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04
13.4	Rasio Lapangan Olahraga per 1000 Penduduk	0,11	0,12	0,14	0,15	0,17	0,17



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA				KONDISI AKHIR (2026)
			2023	2024	2025	2026	
14.	Statistik						
14.1.	Persentase Ketersediaan Data Informasi Statistik Sektoral	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15.	Persandian						
15.1.	Persentase Berita Sandi Daerah yang diamankan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16.	Kebudayaan						
16.1.	Persentase Benda dan Situs Cagar Budaya yang dikelola	40,00	60,00	60,00	80,00	100,00	100,00
16.2.	Persentase Kegiatan Seni Budaya yang dilaksanakan	86,00	89,00	93,00	95,00	100,00	100,00
16.3.	Persentase Pengelolaan Situs Bersejarah	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	60,00
17.	Perpustakaan						
17.1.	Persentase Jenis Koleksi Perpustakaan Umum Daerah	68,17	69,67	71,17	72,67	74,17	74,17
17.2.	Persentase Perpustakaan Desa/Kelurahan/Kecamatan yang dikembangkan	17,65	19,44	21,62	23,68	25,64	25,64
18.	Kearsipan						
18.1.	Persentase OPD, Kelurahan dan Pemerintahan Desa, BUMN, BUMD, Perguruan tinggi yang Tertib Arsip	66,30	72,57	78,85	85,13	91,40	91,40
18.2.	Persentase OPD, Kelurahan, Pemerintahan Desa, Perguruan Tinggi, BUMN dan BUMD yang Dibina/Dilatih	57,14	64,29	71,43	78,57	85,71	85,71



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA				KONDISI AKHIR (2026)
			2023	2024	2025	2026	
C.	FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN						
1.	Pariwisata						
1.1.	Destinasi Wisata yang Berkualitas (%)	7,40	24,07	42,59	66,67	100,00	100,00
1.2.	Persentase Usaha Pariwisata yang Memiliki Sertifikasi / Memenuhi Standar Usaha Pariwisata	41,45	45,60	50,16	55,17	60,69	60,69
1.3.	Persentase Pelaku Wisata yang Memiliki Sertifikasi Profesi	5,00	10,00	25,00	35,00	50,00	50,00
2.	Pertanian						
2.1.	Peningkatan Kelompok Tani (%)	2,10	2,44	2,51	2,57	2,62	2,62
2.2.	Persentase Penyuluh Pertanian Berkinerja BAIK (Sesuai kriteria Permentan Nomor 91 Tahun 2013)	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Perdagangan						
3.1.	Persentase Penurunan Pelanggaran Alat UTP	20,00	16,00	14,00	8,00	4,00	4,00
3.2.	Persentase Penurunan Peredaran Barang dan Jasa yang tidak sesuai Standar	10,81	8,11	7,50	5,00	2,50	2,50
3.3.	Persentase tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perdagangan yang Representatif	23,53	40,00	60,00	80,00	100,00	100,0



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA				KONDISI AKHIR (2026)
			2023	2024	2025	2026	
4.	Perindustrian						
4.1.	Persentase Peningkatan IKM yang Berbasis Teknologi	74,74	75,89	76,92	79,47	82,39	82,39
4.2.	Persentase IKM terlatih terhadap Jumlah IKM	14,12	15,46	16,07	16,15	16,56	16,56
5.	Kelautan dan Perikanan						
5.1.	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	724,77	768,26	814,36	863,22	915,01	915,01
5.2.	Persentase Nelayan yang Naik Kelas	25,50	28,87	34,43	37,60	40,00	40,00
5.3.	Persentase Pembudidaya Ikan yang Naik Kelas	40,55	44,29	48,,34	53,09	56,50	56,50
D	PENUNJANG URUSAN						
1.	Perencanaan Pembangunan						
1.1.	Persentase Program RKPD yang dijabarkan dalam APBD Tiap Tahunnya	75,00	77,00	79,00	80,00	82,00	82,00
1.2.	Persentase Keselarasan RKPD terhadap PD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3.	Persentase Keselarasan Program RKPD terhadap Program RKP	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00	80,00
1.4.	Persentase Keselarasan Renstra PD terhadap RPD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.5.	Persentase Usulan Masyarakat yang diakomodir dalam Musrenbang RKPD	67,00	69,00	71,00	73,00	75,00	75,00
1.6.	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan	100	100	100	100	100	100



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA				KONDISI AKHIR (2026)
			2023	2024	2025	2026	
	daerah yang lengkap, akurat dan Tepat Waktu						
2.	Keuangan						
2.1.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.2.	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
3.	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan						
3.1.	Persentase Peningkatan Kualitas Aparatur yang Kompeten sesuai Tupoksi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.2.	Persentase Aparatur yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	63,50	65,62	66,25	68,75	75,00	75,00
3.3.	Persentase Aparatur yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	13,33	17,14	20,00	22,20	24,44	24,44
4.	Penelitian dan Pengembangan						
4.1.	Persentase Penelitian yang Mendukung Perencanaan yang dilaksanakan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.2.	Persentase Rumusan Kebijakan yang dihasilkan dari Hasil Penelitian	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.3.	Persentase Peningkatan Inovasi Daerah yang dikembangkan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA				KONDISI AKHIR (2026)
			2023	2024	2025	2026	
5.	Pengawasan						
5.1.	% OPD yang Bebas dari Penyimpangan Keuangan yang Material	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	95,00
5.2.	% Rekomendasi Temuan Hasil Pengawasan APIP yang Selesai ditindaklanjuti	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	95,00
5.3.	Jumlah Rekomendasi Temuan Hasil Pengawasan BPK yang Selesai ditindaklanjuti	9	8	7	6	5	5
5.4.	% Kasus/Pengaduan Masyarakat yang ditangani	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.5.	% OPD yang Maturitas SPIP Minimal Level 3	64,71	73,53	82,35	91,18	100,00	100,00
6.	Sekretariat Dewan						
6.1.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD	12 Rencana Kerja	12 Rencana Kerja	12 Rencana Kerja	12 Rencana Kerja	12 Rencana Kerja	12 Rencana Kerja
6.2.	Tersusun dan Terintegrasinya Program – Program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	3 Raperda	3 Raperda	3 Raperda	3 Raperda	3 Raperda	3 Raperda



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA				KONDISI AKHIR (2026)
			2023	2024	2025	2026	
6.3.	Terintegrasinya Program-Program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	1 Program	1 Program	1 Program	1 Program	1 Program	1 Program

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam rangka mewujudkan pencapaian Target Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan yang diformulasikan dalam program dan kegiatan untuk mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja, dengan prioritas kegiatan utama program-program beserta indikator kinerja program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

Program Utama / Prioritas Daerah yang menjadi strategi umum pembangunan dalam RPD Kabupaten Barito Selatan tahun 2023-2026 sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan



3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Berencana dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Untuk memberi arah pembangunan tahunan pada RPD di buat Fokus Tema Pembangunan Kabupaten Barito Selatan, untuk masing-masing Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dari Tahun 2023 sampai Tahun 2026. Sehingga RKPD **Tahun 2025 difokuskan pada** *“Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas untuk pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan dan membuka kesempatan kerja yang luas”*.

A. Pencapaian Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Atas Perjanjian Kinerja Bupati Barito Selatan Dalam Pelaksanaan Program / Kegiatan

Berdasarkan surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/37/AA.01/2025 tanggal 14 November 2025 hal Pemberitahuan Penyampaian Laporan Kinerja 2025.



Sehubungan dengan Tahun 2025 merupakan masa transisi periode perencanaan berupa penetapan Renstra dan RPJMD 2025-2029, maka terdapat beberapa penyesuaian yang dapat diakomodir dalam rangka penyusunan Pelaporan Kinerja 2025. ***Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 disusun untuk menjawab Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra dan RPD 2023-2026 yang digunakan selama masa transisi.***

Sebagai penyempurnaan daripada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengacu pada ***Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Intansi Pemerintah.***

Dalam rangka menerapkan manajemen kinerja adalah Pengukuran Kinerja Kegiatan yang menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan pencapaian kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Sehingga



pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi instansi pemerintah.

Pencapaian program prioritas pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 dapat jelaskan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Potensial dan Ekonomi Kreatif serta Mendorong Masuknya Investasi Daerah

Tabel berikut ini menggambarkan capaian sasaran strategis Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Potensial dan Ekonomi Kreatif serta Mendorong Masuknya Investasi Daerah dengan realisasi perbandingan dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Capaian Kinerja Pertumbuhan Sektor Potensial dan Ekonomi Kreatif serta Mendorong Masuknya Investasi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian Kinerja					
			Target 2023	Realisasi	Target 2024	Realisasi	Target 2025	Realisasi
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Potensial dan Ekonomi Kreatif serta Mendorong Masuknya Investasi Daerah	1. Tingkat Inflasi	Persen	2-4	2,11	2-4	2,02	2-4	3,31%
	2. PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Milyar Rupiah	85,8	95	87,8	36,8	89,8	98,5
	3. PDRB Perkapita	Juta	59,25	100	60,14	47,5	61,08	68,4

Sumber Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan dan TPID Kab. Barsei

Analisis capaian kinerja terhadap sasaran strategis Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Potensial dan Ekonomi Kreatif serta Mendorong Masuknya Investasi Daerah

1. Tingkat Inflasi

Kabupaten Barito Selatan merupakan Daerah Non Indeks Harga Konsumen (Non-IHK) adalah wilayah yang tidak dihitung inflasinya berdasarkan komponen IHK standar, melainkan menggunakan Indeks

Perkembangan Harga (IPH). IPH memantau fluktuasi harga komoditas pokok, terutama pangan, dengan mengacu pada daerah terdekat yang memiliki pola konsumsi sama, guna mengendalikan inflasi melalui operasi pasar dan pantauan rutin oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Barito Selatan.

Untuk tingkat inflasi Kabupaten Barito Selatan pada Desember 2025, merujuk pada Kota Palangka Raya terjadi inflasi tahun ke tahun (year on year) sebesar 3,31% dengan Indeks Harga Konsumen sebesar 109,60. (Sumber BPS Kota Palangka Raya)

Analisis Capaian	Kendala Yang Dihadapi	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Realisasi inflasi sebesar 3,31% berada dalam rentang target yang ditetapkan (2-4%). Hal ini menunjukkan bahwa: • Pengendalian harga relatif efektif. • Stabilitas pasokan dan distribusi barang kebutuhan pokok cukup terjaga. • Koordinasi pengendalian inflasi daerah berjalan baik. Secara umum capaian ini mencerminkan kondisi ekonomi daerah yang stabil dan daya beli masyarakat yang relatif terjaga.	- Ketergantungan pasokan bahan pokok dari luar daerah - Fluktuasi harga komoditas pangan (beras, cabai, bawang) - Biaya transportasi relatif tinggi - Cuaca ekstrim	- Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) aktif - Operasi pasar dan pasar murah - Kerja sama antar daerah (KAD) - Pemantauan harga rutin	- Infrastruktur distribusi belum optimal - Akses wilayah tertentu terbatas - Ketergantungan pada komoditas tertentu - Gejala ekonomi nasional/global

2. PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Analisis Capaian	Kendala Yang Dihadapi	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Capaian ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi pada sektor akomodasi dan makan minum mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan sepanjang tahun 2025. Peningkatan tersebut mengindikasikan adanya peningkatan permintaan terhadap layanan penginapan, restoran, rumah makan, dan usaha kuliner lainnya. Kondisi ini juga mencerminkan semakin berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat, mobilitas penduduk, serta kegiatan sosial dan bisnis.	Meskipun capaian kinerja melampaui target, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, antara lain: 1. Terbatasnya jumlah dan kualitas fasilitas akomodasi, terutama penginapan yang memenuhi standar pelayanan yang baik. 2. Skala usaha kuliner yang masih didominasi oleh UMKM sehingga kapasitas produksi dan pelayanan masih terbatas. 3. Promosi potensi wisata daerah yang belum optimal, sehingga kunjungan wisatawan belum maksimal.	Beberapa faktor yang mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut antara lain: 1. Meningkatnya mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi daerah, seperti kegiatan pemerintahan, bisnis, dan sosial. 2. Pertumbuhan usaha kuliner dan rumah makan baru, yang memperluas pilihan konsumsi masyarakat. 3. Peran UMKM sektor makanan dan minuman yang cukup aktif dalam mengembangkan usaha.	Beberapa faktor yang masih berpotensi menghambat perkembangan sektor ini antara lain: 1. Terbatasnya investasi di sektor perhotelan dan restoran skala besar. 2. Aksesibilitas dan konektivitas transportasi ke daerah yang masih terbatas. 3. Kualitas infrastruktur pendukung pariwisata yang belum merata.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025

yang berdampak pada meningkatnya konsumsi jasa akomodasi dan makan minum di daerah. Selain itu, capaian ini menunjukkan bahwa sektor ini menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya dalam mendukung aktivitas perdagangan, jasa, dan pariwisata lokal.	4. Keterbatasan SDM di sektor hospitality, terutama dalam hal manajemen layanan, kebersihan, dan standar pelayanan. 5. Fluktuasi daya beli masyarakat, yang dapat mempengaruhi tingkat konsumsi pada sektor makan minum	4. Adanya kegiatan/event daerah, seperti kegiatan pemerintahan, pelatihan, atau kegiatan sosial yang meningkatkan kebutuhan akomodasi dan konsumsi. 5. Perkembangan layanan digital dan pemesanan makanan, yang mempermudah akses masyarakat terhadap layanan makan minum	4. Persaingan usaha yang semakin tinggi, terutama bagi usaha kecil yang memiliki keterbatasan modal. 5. Kurangnya inovasi produk dan standar pelayanan pada sebagian pelaku usaha kuliner.
--	--	--	---

3. PDRB Perkapita

Analisis Capaian	Kendala Yang Dihadapi	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Capaian ini menunjukkan bahwa rata-rata nilai tambah ekonomi yang dihasilkan per penduduk mengalami peningkatan dibandingkan dengan target yang direncanakan. Peningkatan PDRB per kapita tersebut mencerminkan adanya pertumbuhan aktivitas ekonomi daerah yang cukup baik pada berbagai sektor, seperti perdagangan, jasa, pertanian, serta sektor-sektor lainnya yang menjadi penopang ekonomi Kabupaten Barito Selatan. Selain itu, meningkatnya PDRB per kapita juga mengindikasikan adanya peningkatan produktivitas ekonomi daerah, yang dapat dipengaruhi oleh pertumbuhan output daerah yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi daerah berjalan cukup efektif dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi yang dihasilkan oleh masyarakat.	Dalam upaya peningkatan PDRB per kapita, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain: 1. Struktur ekonomi daerah yang masih bertumpu pada sektor primer, sehingga rentan terhadap fluktuasi harga komoditas. 2. Keterbatasan investasi di beberapa sektor produktif, yang dapat membatasi percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. 3. Kualitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal keterampilan dan produktivitas tenaga kerja. 4. Keterbatasan infrastruktur pendukung ekonomi, seperti akses transportasi, distribusi barang, dan konektivitas antarwilayah. 5. Belum optimalnya pengembangan sektor unggulan daerah, yang seharusnya dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi.	1. Pertumbuhan ekonomi daerah yang cukup stabil pada beberapa sektor utama. 2. Peningkatan aktivitas perdagangan dan jasa, yang turut memberikan kontribusi terhadap nilai tambah ekonomi daerah. 3. Perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang semakin aktif dalam kegiatan ekonomi lokal. 4. Program pembangunan dan belanja pemerintah daerah, yang mendorong perputaran ekonomi masyarakat. 5. Meningkatnya produktivitas pada beberapa sektor ekonomi, sehingga meningkatkan nilai tambah yang dihasilkan.	Beberapa faktor yang masih berpotensi menghambat peningkatan PDRB per kapita di Kabupaten Barito Selatan antara lain: 1. Ketergantungan pada sektor ekonomi tertentu, sehingga pertumbuhan ekonomi kurang terdiversifikasi. 2. Fluktuasi harga komoditas di pasar regional maupun nasional, yang dapat mempengaruhi pendapatan daerah. 3. Keterbatasan akses permodalan bagi pelaku usaha, terutama UMKM. 4. Keterbatasan infrastruktur ekonomi di beberapa wilayah, yang dapat menghambat distribusi barang dan jasa. 5. Ketimpangan tingkat produktivitas antar sektor ekonomi, sehingga kontribusi terhadap PDRB belum merata.

2. Meningkatnya Konektivitas Wilayah

Tabel 3.2.
Capaian Kinerja Meningkatnya Konektivitas Wilayah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian Kinerja					
			Target 2023	Realisasi	Target 2024	Realisasi	Target 2025	Realisasi
Meningkatnya Konektivitas Wilayah	1. Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap	Persen	36,60	36,50	37,57	37,90	39,53	33,50
	2. Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	Persen	51,25	51,25	54,05	54,05	55	65,59
	3. Persentase Layanan Angkutan Darat dan Sungai	Persen	50	29,01	55	23,40	50	62,10

Sumber data Dinas PUPR dan Dishub

Analisis capaian terhadap sasaran strategis meningkatnya konektivitas wilayah sebagai berikut :

1. Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap

Analisis Capaian	Kendala Yang Dihadapi	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Capaian kinerja belum memenuhi target, dengan selisih kekurangan sebesar 6,03%. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas dan kemandirian jalan kabupaten telah berjalan, namun belum optimal sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan dalam dokumen kinerja. Secara keseluruhan, capaian IKU Jalan dalam Kondisi Mantap Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 sebesar 33,50% menunjukkan adanya kemajuan, namun belum mencapai target 39,53%. Diperlukan peningkatan alokasi anggaran, penguatan pemeliharaan rutin, serta penanganan berbasis prioritas dan kondisi lapangan agar capaian kinerja pada tahun berikutnya dapat lebih optimal.	Beberapa kendala utama yang memengaruhi belum tercapainya target IKU antara lain: - Keterbatasan anggaran pembangunan dan pemeliharaan jalan, sehingga tidak seluruh ruas prioritas dapat ditangani. - Kondisi geografis dan tanah dasar di sebagian wilayah yang kurang stabil, menyebabkan kerusakan jalan terjadi lebih cepat. - Curah hujan yang tinggi, yang menghambat pelaksanaan pekerjaan fisik dan mempercepat degradasi konstruksi jalan. - Keterbatasan waktu pelaksanaan, terutama pada paket pekerjaan yang mengalami keterlambatan proses pengadaan.	Faktor-faktor yang mendukung pencapaian kinerja antara lain: - Komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan konektivitas dan pelayanan infrastruktur jalan. - Penetapan ruas jalan prioritas, sehingga sumber daya yang terbatas tetap dapat diarahkan pada akses strategis. - Dukungan kebijakan dan perencanaan teknis, termasuk tersedianya dokumen perencanaan dan standar teknis pelaksanaan. - Koordinasi lintas perangkat daerah, terutama dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program pembangunan jalan.	Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat utama adalah: - Kesenjangan antara kebutuhan riil penanganan jalan dengan kemampuan pendanaan daerah. - Beban lalu lintas kendaraan berat yang melebihi kapasitas jalan, mempercepat kerusakan. - Keterbatasan peralatan dan sumber daya teknis, terutama untuk penanganan jalan di wilayah terpencil. - Pemeliharaan rutin yang belum optimal, sehingga beberapa ruas jalan cepat turun kondisi dari mantap menjadi tidak mantap.

2. Peresentase Jembatan Dalam Kondisi Baik

Analisis Capaian	Kendala Yang Dihadapi	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Capaian kinerja melampaui target yang ditetapkan, dengan kelebihan sebesar 10,59%. Hal ini menunjukkan bahwa program pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jembatan berjalan efektif dan memberikan hasil yang optimal sesuai dengan sasaran kinerja pemerintah daerah. Secara keseluruhan, IKU Jembatan dalam Kondisi Baik Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 dengan realisasi 65,59% telah melampaui target 55% yang ditetapkan. Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas program penanganan jembatan yang dilaksanakan. Ke depan, fokus perlu diarahkan pada pemeliharaan berkelanjutan dan mitigasi risiko kerusakan, agar kondisi jembatan yang sudah baik dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan.	Meskipun capaian melebihi target, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program antara lain: - Kondisi geografis dan aksesibilitas lokasi jembatan, terutama di wilayah terpencil, yang menyulitkan mobilisasi material dan peralatan. - Pengaruh cuaca, khususnya curah hujan tinggi, yang berpotensi menghambat pekerjaan konstruksi dan pemeliharaan. - Keterbatasan anggaran pemeliharaan rutin, terutama untuk jembatan dengan umur layanan yang sudah cukup lama. - Beban lalu lintas kendaraan berat, yang dapat mempercepat penurunan kondisi struktur jembatan.	Faktor-faktor yang mendukung tercapainya bahkan terlampauinya target kinerja antara lain: - Prioritas penanganan jembatan strategis, terutama yang menjadi penghubung utama antarwilayah. - Pelaksanaan rehabilitasi dan penggantian jembatan secara tepat sasaran, berdasarkan hasil inspeksi kondisi. - Perencanaan teknis yang baik dan matang, sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai spesifikasi. - Komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keselamatan dan kelancaran transportasi melalui peningkatan kualitas jembatan.	Adapun faktor-faktor yang masih menjadi penghambat dalam pengelolaan jembatan antara lain: - Keterbatasan pendanaan jangka panjang untuk pemeliharaan preventif dan berkala. - Usia teknis sebagian jembatan yang sudah mendekati atau melewati umur rencana. - Keterbatasan sumber daya teknis dan peralatan khusus, terutama untuk inspeksi struktur jembatan secara detail. - Risiko bencana alam seperti banjir dan gerusan sungai, yang dapat memengaruhi stabilitas jembatan.

3. Persentase Layanan Angkutan Darat dan Sungai

Analisis Capaian	Kendala Yang Dihadapi	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Persentase layanan angkutan darat dan sungai menunjukkan tingkat ketersediaan serta keterjangkauan layanan transportasi bagi masyarakat. Secara umum, capaian layanan angkutan darat cenderung lebih tinggi dibandingkan angkutan sungai, karena didukung oleh jaringan jalan yang lebih luas dan penggunaan kendaraan darat yang lebih dominan. Sementara itu, angkutan sungai masih memiliki peran	1. Keterbatasan infrastruktur, seperti kondisi jalan yang belum memadai dan sarana Dermaga yang kurang optimal. 2. Keterbatasan Armada Angkutan, baik dari segi jumlah maupun kondisi teknis. 3. Faktor geografis dan cuaca, khususnya pada angkutan sungai yang sangat bergantung pada tinggi muka air dan musim.	1. Peningkatan kebutuhan mobilitas masyarakat dan distribusi barang. 2. Ketersediaan sumber daya manusia sebagai operator dan pengelola transportasi. 3. Sinergi antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan layanan angkutan.	1. Kerusakan infrastruktur yang memadai. 2. Rendahnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum akibat kualitas layanan yang belum optimal. 3. Kurangnya integrasi antar moda transportasi. 4. Keterbatasan teknologi dan sistem manajemen transportasi yang masih konvensional.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025

strategis, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan akses darat. Capaian layanan ini mencerminkan upaya Dinas Perhubungan Kab. Barito Selatan dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah serta mendukung mobilitas orang dan barang.			
--	--	--	--

3. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Tabel 3.3.

Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian Kinerja					
			Target 2023	Realisasi	Target 2024	Realisasi	Target 2025	Realisasi
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	72,90	71,98	73,17	73,22	76,74	81,22

Sumber data Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Selatan

- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Analisis Capaian	Kendala Yang Dihadapi	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Realisasi IKLH sebesar 81,22 telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 76,74, dengan selisih +4,48 poin. Capaian ini menunjukkan bahwa kondisi kualitas lingkungan hidup berada pada kategori baik dan kinerja pengelolaan lingkungan hidup berjalan efektif dan melebihi ekspektasi perencanaan. Secara keseluruhan, capaian IKLH dengan realisasi 81,22 menunjukkan kinerja yang sangat baik dan melampaui target 76,74. Ke depan, dipertukan upaya konsisten untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan memperkuat faktor pendukung serta meminimalkan kendala dan faktor penghambat yang ada.	Meskipun target terlampaui, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, antara lain: 1. Tekanan aktivitas manusia, seperti pertumbuhan penduduk, peningkatan volume limbah domestik, dan alih fungsi lahan. 2. Keterbatasan sumber daya, baik dari sisi anggaran, sarana prasarana pemantauan, maupun SDM teknis lingkungan. 3. Kesadaran masyarakat yang belum merata terhadap pentingnya menjaga kualitas lingkungan hidup. 4. Keterbatasan data lingkungan yang kontinu dan terintegrasi, terutama pada wilayah tertentu.	Capaian IKLH yang melampaui target didukung oleh beberapa faktor utama, yaitu: 1. Komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup melalui kebijakan dan regulasi yang konsisten. 2. Pelaksanaan program dan kegiatan lingkungan yang berkelanjutan, seperti pengendalian pencemaran, rehabilitasi lahan, dan pengelolaan sampah. 3. Sinergi lintas sektor dan pemangku kepentingan, termasuk peran dunia usaha dan partisipasi masyarakat. 4. Peningkatan pengawasan dan pemantauan kualitas lingkungan, sehingga potensi pencemaran dapat lebih cepat dikendalikan. 5. Kondisi alam yang relatif	Adapun faktor yang berpotensi menghambat pencapaian dan keberlanjutan IKLH ke depan meliputi: 1. Perkembangan pembangunan yang tidak ramah lingkungan apabila tidak diimbangi dengan pengendalian yang memadai. 2. Perubahan iklim yang dapat mempengaruhi kualitas udara, air, dan ekosistem secara keseluruhan. 3. Penegakan hukum lingkungan yang belum optimal terhadap pelanggaran pencemaran dan perusakan lingkungan. 4. Ketergantungan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025

		mendukung, seperti masih terjaganya kawasan hijau dan ekosistem tertentu	pada perilaku masyarakat, yang memerlukan waktu dan upaya berkelanjutan untuk berubah ke arah yang lebih peduli lingkungan.
--	--	--	---

4. Meningkatnya Fungsi Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Tabel 3.4.

Capaian Kinerja Meningkatnya Fungsi Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian Kinerja					
			Target 2023	Realisasi	Target 2024	Realisasi	Target 2024	Realisasi
Meningkatnya Fungsi Tata Ruang Wilayah Kabupaten	Ketaatan Terhadap RTRW	Persen	25,00	22,00	75	75	75	100

Sumber data Dinas PUPR dan Disperkimtan Kab. Barito Selatan

- Ketaatan Terhadap RTRW

Analisis Capaian	Kendala Yang Dihadapi	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Realisasi Ketaatan terhadap RTRW sebesar 100 menunjukkan bahwa seluruh kegiatan pemanfaatan ruang telah sesuai dengan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Capaian ini melampaui target yang ditetapkan sebesar 75, dengan selisih +25 poin. Hasil tersebut mencerminkan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang berjalan sangat optimal, serta adanya kepatuhan tinggi dari pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat terhadap kebijakan tata ruang yang berlaku. Secara kinerja, indikator ini berada pada kategori sangat berhasil. Untuk menjaga capaian ini, diperlukan penguatan pengawasan, konsistensi penegakan hukum serta penyesuaian kebijakan tata ruang agar tetap relevan dengan dinamika pembangunan wilayah.	Meskipun capaian mencapai 100, dalam proses pelaksanaannya tetap ditemui beberapa kendala, antara lain: 1. Potensi konflik kepentingan pemanfaatan ruang, terutama antara kebutuhan pembangunan dan perlindungan kawasan. 2. Tekanan pembangunan dan investasi, yang menuntut percepatan perizinan dan berisiko pada penyimpangan tata ruang. 3. Keterbatasan sumber daya pengawasan, baik SDM pengawasan tata ruang maupun dukungan teknologi pemantauan. 4. Perubahan regulasi atau kebijakan sektoral, yang memerlukan penyesuaian dalam implementasi RTRW	Capaian maksimal indikator ketaatan RTRW didukung oleh beberapa faktor utama, yaitu: 1. Ketersediaan dokumen RTRW yang jelas dan operasional, sehingga mudah dijadikan acuan dalam pengendalian pemanfaatan ruang. 2. Komitmen kuat pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan tata ruang secara konsisten. 3. Koordinasi lintas perangkat daerah yang baik dalam proses perizinan dan pengawasan pemanfaatan ruang. 4. Penerapan sistem perizinan berbasis tata ruang, sehingga setiap kegiatan pembangunan dapat dikendalikan sejak awal. 5. Peningkatan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha serta masyarakat terhadap aturan tata ruang.	1. Pesatnya perkembangan wilayah dan urbanisasi, yang dapat meningkatkan tekanan terhadap kesesuaian pemanfaatan ruang. 2. Alih fungsi lahan ilegal, terutama pada kawasan lindung atau kawasan pertanian. 3. Keterbatasan penegakan sanksi, jika tidak dilakukan secara konsisten terhadap pelanggaran tata ruang. 4. Ketidaksinkronan kebijakan antar level pemerintahan, yang dapat menimbulkan interpretasi berbeda dalam pelaksanaan RTRW

5. Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat

Tabel 3.5.
Capaian Kinerja Meningkatnya Ketertiban dan
Ketentraman Masyarakat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian Kinerja					
			Target 2023	Realisasi	Target 2024	Realisasi	Target 2025	Realisasi
Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	1. Gangguan Ketertiban Umum yang ditangani	Persen	85	100	90	100	95	95
	2. Penegakan Perda	Persen	100	100	100	100	95	95

Sumber data Satpol PP

1. Gangguan Ketertiban Umum yang ditangani

Analisis Capaian	Kendala Yang Dihadapi	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Realisasi penanganan Gangguan Ketertiban Umum sebesar 95 telah sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga capaian kinerja berada pada kategori berhasil/tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar gangguan ketertiban umum yang terjadi telah ditangani secara cepat, tepat, dan sesuai prosedur. Kesetaraan antara target dan realisasi mencerminkan bahwa perencanaan target telah disusun secara realistis serta pelaksanaan kegiatan pengendalian ketertiban umum berjalan efektif dan konsisten.	Dalam upaya penanganan gangguan ketertiban umum masih dijumpai beberapa kendala, antara lain: 1. Tingginya dinamika dan frekuensi gangguan ketertiban, terutama pada waktu dan lokasi tertentu. 2. Keterbatasan jumlah personel dan sarana pendukung, yang mempengaruhi kecepatan dan jangkauan penanganan. 3. Kurangnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap aturan dan ketentuan ketertiban umum 4. Resistensi masyarakat atau pelaku pelanggaran, yang terkadang menghambat proses penanganan di lapangan.	Pencapaian target penanganan gangguan ketertiban umum didukung oleh beberapa faktor utama, yaitu: 1. Komitmen dan kesiapsiagaan aparat penegak ketertiban, dalam merespons setiap laporan gangguan. 2. Koordinasi yang baik dengan instansi terkait, seperti kepolisian, perangkat daerah, dan aparat kewilayahan. 3. Adanya standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dalam penanganan gangguan ketertiban umum 4. Partisipasi masyarakat dalam pelaporan gangguan, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat.	Adapun faktor yang berpotensi menghambat peningkatan kinerja ke depan meliputi: 1. Pertumbuhan aktivitas masyarakat dan ekonomi, yang berpotensi meningkatkan potensi gangguan ketertiban umum 2. Keterbatasan anggaran operasional, terutama untuk pemeliharaan sarana dan peningkatan kapasitas personel. 3. Belum optimalnya upaya pencegahan, sehingga penanganan masih bersifat reaktif. 4. Perubahan sosial dan budaya masyarakat, yang memerlukan pendekatan persuasif dan berkelanjutan.

2. Penegakan Perda

Analisis Capaian	Kendala Yang Dihadapi	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Realisasi penegakan Perda sebesar 95 telah sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga capaian kinerja berada pada kategori tercapai/berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar	Dalam pelaksanaan penegakan Perda, masih terdapat beberapa kendala, antara lain: 1. Tingkat pelanggaran Perda yang fluktuatif, dipengaruhi oleh dinamika sosial dan aktivitas masyarakat.	Pencapaian target penegakan Perda didukung oleh beberapa faktor utama, yaitu: 1. Komitmen dan profesionalisme aparat penegak Perda dalam menjalankan tugas sesuai peraturan	Adapun faktor yang berpotensi menghambat peningkatan kinerja penegakan Perda ke depan meliputi: 1. Perubahan sosial dan ekonomi masyarakat, yang berpotensi menimbulkan jenis

pelanggaran Perda yang terjadi telah ditindaklanjuti dan ditangani sesuai ketentuan yang berlaku. Kesesuaian antara target dan realisasi mencerminkan bahwa perencanaan kinerja telah disusun secara realistis serta pelaksanaan penegakan Perda berjalan konsisten dan efektif.	2. Keterbatasan jumlah personel penegak Perda, khususnya untuk menjangkau seluruh wilayah secara optimal. 3. Kurangnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap substansi dan sanksi Perda. 4. Resistensi dari pelanggar, yang terkadang menghambat proses penertiban di lapangan.	perundang-undangan. 2. Adanya regulasi dan SOP yang jelas, sehingga penindakan dapat dilakukan secara terukur dan akuntabel. 3. Koordinasi yang baik dengan instansi terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, dan perangkat daerah lainnya. 4. Dukungan pimpinan daerah, baik dari sisi kebijakan maupun penganggaran.	pelanggaran baru. 2. Keterbatasan sarana dan prasarana operasional, termasuk kendaraan, alat komunikasi, dan perlengkapan penertiban. 3. Penegakan sanksi yang belum sepenuhnya optimal, terutama untuk memberikan efek jera. 4. Pendekatan persuasif yang membutuhkan waktu, sehingga hasil penegakan belum dapat dirasakan secara cepat.
--	---	---	--

6. Menurunnya Kemiskinan di Pedesaan dan Perkotaan

Tabel 3.6.
Capaian Kinerja Menurunnya Kemiskinan
di Pedesaan dan Perkotaan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian Kinerja					
			Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Menurunnya Kemiskinan di Pedesaan dan Perkotaan	1. Angka Kemiskinan Daerah	Persen	4,6	4,72	4,93	4,94	4,6	4
	2. Angka Kemiskinan Ekstrem	Persen	0,19	0,16	0,19	0,17	0,19	0,15
	3. Indeks Desa Membangun	Indeks	0,6722 (Berkembang)	0,7018 (Berkembang)	0,7018 (Berkembang)	0,7018	0,7142 (Berkembang)	0,7142

Sumber data Bapperida dan Dinas PMDes Kab. Barito Selatan

1. Angka Kemiskinan Daerah

Analisis Capaian	Kendala Yang Dihadapi	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Angka kemiskinan capaian 4,0% lebih rendah dari target 4,6%, ini menunjukkan ada <i>trend</i> penurunan kemiskinan di daerah. Secara sederhana, capaian target lebih rendah dari yang direncanakan menunjukkan kemajuan positif dalam upaya penurunan kemiskinan di Barito Selatan. Penurunan angka ini menunjukkan keberhasilan upaya-upaya pembangunan yang diarahkan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.	a. Keterbatasan Struktur Ekonomi Lokal - Perekonomian daerah yang masih didominasi oleh sektor pertanian dan informal membuat peningkatan pendapatan per kapita lambat dan rentan terhadap gejolak harga komoditas. - Struktur ekonomi yang dominan sektor primer berarti kurangnya alternatif pendapatan non-pertanian bagi masyarakat. b. Ketimpangan akses layanan dasar - Akses ke pendidikan,	a. Program bantuan sosial & subsidi. Program bantuan sosial seperti PKH, BPNT, JKN-PBI dan bantuan langsung tunai desa era pembangunan kontribusi secara langsung pada kesejahteraan rumah tangga miskin. b. Pemberdayaan ekonomi lokal. Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah dan program pelatihan vokasi mampu membuka peluang pendapatan baru bagi masyarakat. c. Infrastruktur lebih baik. Peningkatan infrastruktur	a. Rendahnya akses kredit dan inklusi keuangan. Banyak rumah tangga miskin sulit mendapat akses ke kredit produktif sehingga kemampuan modal usaha terbatas (lihat studi mikrofinansial). b. Ketergantungan pada pertanian tradisional. Ketergantungan pada hasil pertanian tradisional yang produktivitasnya rendah membuat pendapatan rumah tangga sulit meningkat signifikan. c. Ketimpangan

	pelayanan kesehatan, maupun peluang kerja berkualitas di daerah terpencil masih terbatas, menghambat kemampuan masyarakat untuk keluar dari garis kemiskinan. Infrastruktur sosial dan ekonomi kurang merata antara wilayah pusat kota dan pedesaan.	dasar seperti jalan desa, akses pasar, dan sarana irigasi mempercepat pendistribusian hasil pertanian dan membuka akses pelayan. d. Program pengentasan kemiskinan yang terfokus. Kelengkapan pemerintah dan lintas sektor menjalankan program terintegrasi seperti pengembangan desa, pemberdayaan masyarakat, dan perbaikan sanitasi dan kesehatan.	pembangunan wilayah Area terpencil mengalami kesulitan akses layanan pendidikan, kesehatan, dan pasar kerja dibandingkan pusat pemerintahan atau kota besar. d. Kebijakan yang kurang sinergis Program-program bantuan seringkali kurang optimal koordinasi antar instansi atau tidak tepat sasaran sehingga efeknya kurang maksimal.
--	---	---	---

2. Angka Kemiskinan Ekstrem

Analisis Capaian	Kendala Yang Dihadapi	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Target angka kemiskinan ekstrem Kabupaten Barito Selatan tahun 2025 ditetapkan sebesar 0,19%, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 0,15%. Dengan demikian terdapat selisih capaian sebesar 0,04 poin lebih rendah dari target, yang berarti kinerja indikator telah melampaui target yang ditetapkan (over achievement). Penurunan angka kemiskinan ekstrem menunjukkan bahwa jumlah penduduk dengan tingkat pengeluaran di bawah garis kemiskinan ekstrem semakin kecil, sehingga program penanggulangan kemiskinan di daerah berjalan efektif. Secara umum, kemiskinan ekstrem mengacu pada kondisi penduduk yang pengeluarannya berada di bawah standar kemiskinan ekstrem global sekitar US\$2,15 PPP per kapita per hari menurut metode Bank Dunia yang diadopsi dalam pengukuran kemiskinan. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa berbagai kebijakan pemerintah daerah yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlindungan sosial, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin ekstrem telah memberikan dampak positif. Selain itu, capaian yang lebih rendah dari target menunjukkan adanya percepatan penurunan kemiskinan ekstrem.	- Keterbatasan akses infrastruktur di wilayah terpencil. Beberapa desa atau wilayah di Kabupaten Barito Selatan masih memiliki keterbatasan akses jalan, air bersih, serta layanan dasar sehingga menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat. - Akses layanan dasar yang belum merata. Akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin ekstrem di wilayah tertentu masih belum optimal. - Ketergantungan pada sektor ekonomi primer. Sebagian besar masyarakat masih bergantung pada sektor pertanian atau pekerjaan informal dengan pendapatan yang tidak stabil. - Validitas dan pemutakhiran data kemiskinan. Tantangan dalam pemutakhiran data rumah tangga miskin sering menyebabkan ketidaktepatan sasaran program bantuan sosial.	Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan penurunan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Barito Selatan antara lain: - Pelaksanaan program perlindungan sosial pemerintah. Program bantuan sosial, jaminan kesehatan, dan bantuan pangan membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin. - Sinergi program pengentasan kemiskinan lintas sektor. Kerja sama antara perangkat daerah, pemerintah pusat, dan pemangku kepentingan lain memperkuat efektivitas program penanggulangan kemiskinan. - Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Program peningkatan kualitas SDM berkontribusi dalam memutus rantai kemiskinan jangka panjang. - Pembangunan infrastruktur dasar. Peningkatan akses jalan, fasilitas kesehatan, dan layanan publik membantu meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.	Selain faktor pendukung, terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yaitu: - Kondisi geografis wilayah. Sebagian wilayah dengan akses transportasi yang sulit menyebabkan distribusi layanan dan program pembangunan tidak merata. - Keterbatasan kesempatan kerja produktif. Lapangan pekerjaan formal yang terbatas menyebabkan sebagian masyarakat masih berada pada pekerjaan berpendapatan rendah. - Rendahnya produktivitas dan keterampilan tenaga kerja. Keterbatasan keterampilan kerja menghambat masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan. - Kerentanan ekonomi rumah tangga. Rumah tangga miskin ekstrem sangat rentan terhadap guncangan ekonomi seperti kenaikan harga kebutuhan.

dibandingkan dengan rencana awal. Namun demikian, untuk menjaga keberlanjutan penurunan kemiskinan ekstrem menuju nol persen, masih diperlukan upaya penguatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan akses layanan dasar, serta perbaikan kualitas data kemiskinan agar intervensi kebijakan lebih tepat sasaran.			pokok, gagal panen, atau kondisi kesehatan.
---	--	--	--

3. Indeks Desa Membangun

Analisis Capaian	Kendala Yang Dihadapi	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya telah berjalan sesuai dengan perencanaan. Nilai IDM ini menggambarkan kondisi perkembangan desa berdasarkan tiga dimensi utama yaitu ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan/ekologi. Capaian indikator Indeks Desa Membangun Kabupaten Barito Selatan berhasil memenuhi target yang ditetapkan (100%), namun peningkatan kualitas pembangunan desa tetap perlu diupayakan secara berkelanjutan melalui penguatan kapasitas desa, optimalisasi potensi ekonomi lokal, peningkatan infrastruktur dasar, serta sinergi program lintas sektor guna meningkatkan status desa menuju desa maju dan mandiri.	Dalam upaya pencapaian indikator IDM beberapa kendala yang masih dihadapi antara lain: 1. Keterbatasan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan program pembangunan dan pemanfaatan data desa. 2. Aksesibilitas wilayah desa tertentu yang masih terbatas, terutama desa yang memiliki kondisi geografis cukup sulit dijangkau. 3. Keterbatasan sarana dan prasarana dasar seperti infrastruktur jalan, jaringan komunikasi, dan fasilitas pelayanan dasar di beberapa desa. 4. Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi desa, khususnya dalam pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat. 5. Ketergantungan terhadap bantuan program pemerintah, sehingga kemandirian ekonomi desa masih perlu ditingkatkan.	Beberapa faktor yang mendukung tercapainya target indikator IDM Kabupaten Barito Selatan antara lain: 1. Komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan desa melalui program dan kegiatan lintas perangkat daerah. 2. Ketersediaan dana desa dan alokasi dana desa yang dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan pelayanan dasar. 3. Koordinasi yang cukup baik antara pemerintah daerah, kecamatan, dan pemerintah desa dalam pelaksanaan program pembangunan desa. 4. Partisipasi masyarakat desa yang cukup aktif dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. 5. Pendampingan desa dari tenaga pendamping profesional yang membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pembangunan desa.	Adapun faktor yang masih menjadi penghambat dalam peningkatan nilai IDM di Kabupaten Barito Selatan meliputi: 1. Kondisi geografis dan sebaran desa yang cukup luas sehingga mempengaruhi pemerataan pembangunan. 2. Keterbatasan sumber daya manusia di desa, baik dari sisi kapasitas manajerial maupun teknis. 3. Terbatasnya akses pasar dan jaringan ekonomi yang menghambat pengembangan potensi ekonomi desa. 4. Belum meratanya akses layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur penunjang lainnya di beberapa desa. 5. Koordinasi lintas sektor yang masih perlu ditingkatkan, terutama dalam integrasi program pembangunan desa dari berbagai perangkat daerah.

7. Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Tabel 3.7.
Capaian Kinerja Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian Kinerja					
			Target 2023	Realisasi	Target 2024	Realisasi	Target 2025	Realisasi
Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang Mandiri	Persen	80	98	80,05	80,3	80	83,5

Sumber data Dinas Sosial Kab. Barito Selatan

Analisis Capaian	Kendala Yang Dihadapi	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Capaian ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan penanganan PMKS yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait telah berjalan efektif dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kemandirian PMKS. Kemandirian yang dimaksud mencakup kemampuan PMKS dalam memenuhi kebutuhan dasar secara lebih baik, memiliki akses terhadap kegiatan ekonomi produktif, serta meningkatnya kemampuan sosial dan ekonomi. Keberhasilan tersebut juga menunjukkan adanya sinergi antara program pemberdayaan sosial, bantuan sosial, serta pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan kepada kelompok sasaran. Secara keseluruhan, indikator persentase PMKS yang mandiri di Kabupaten Barito Selatan tahun 2025 telah melampaui target yang ditetapkan, menunjukkan keberhasilan program pemberdayaan sosial yang dilaksanakan. Namun demikian, masih	Walaupun capaian melampaui target, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, antara lain: 1. Keterbatasan data PMKS yang selalu berubah (dinamis) sehingga membutuhkan pemutakhiran secara berkala agar program tepat sasaran. 2. Keterbatasan jumlah tenaga pendamping sosial dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah PMKS yang harus didampingi. 3. Tingkat pendidikan dan keterampilan PMKS yang masih rendah, sehingga membutuhkan waktu lebih lama dalam proses pemberdayaan. 4. Sebagian PMKS masih memiliki ketergantungan terhadap bantuan sosial, sehingga proses menuju kemandirian memerlukan pendampingan yang intensif.	Beberapa faktor yang mendukung tercapainya target indikator ini antara lain: 1. Adanya program pemberdayaan sosial dan bantuan sosial dari pemerintah pusat maupun daerah, seperti program rehabilitasi sosial, bantuan usaha ekonomi produktif, dan program perlindungan sosial lainnya. 2. Koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, instansi terkait, dan pendamping sosial dalam pelaksanaan program penanganan PMKS. 3. Peran aktif masyarakat dan lembaga sosial dalam membantu proses pemberdayaan dan pendampingan PMKS. 4. Komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, termasuk alokasi anggaran untuk program sosial.	Adapun faktor yang masih menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja indikator ini antara lain: 1. Kondisi ekonomi sebagian PMKS yang masih rentan, sehingga mudah kembali pada kondisi tidak mandiri. 2. Akses terhadap lapangan pekerjaan dan usaha yang masih terbatas, terutama di wilayah pedesaan. 3. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung program pemberdayaan, seperti pelatihan keterampilan dan akses permodalan. 4. Sebaran wilayah yang cukup luas, sehingga mempersulit jangkauan pendampingan secara optimal.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025

diperlukan penguatan pendampingan, peningkatan keterampilan PMS, serta perbaikan sistem data dan akses ekonomi agar kemandirian PMS dapat terus meningkat secara berkelanjutan.			
---	--	--	--

8. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar Permukiman Masyarakat

Tabel 3.8.
Capaian Kinerja Kualitas Pelayanan Dasar
Permukiman Masyarakat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian Kinerja					
			Target 2023	Realisasi	Target 2024	Realisasi	Target 2025	Realisasi
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar Permukiman Masyarakat	1. Persentase Penduduk Berakses Air Minum / Air Bersih	Persen	51,35	77,68	52,35	79,98	53,35 80	80,97
	2. Rasio Rumah Layak Huni	Nilai Rasio	0,191	0,193	0,193	0,21906	0,193	0,275
	3. Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani	Persen	10	8,5	15	16	12	13
	4. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	Persen	65,73	68,00	66,73	75,12	76	76,20
	5. Persentase Drainase dalam kondisi baik	Persen	35,17	34,49	35,87	66,15	70,59	68,57

Sumber data Dinas PUPR dan Dinas PERKIMTAN Kab. Barito Selatan

1. Persentase Penduduk Berakses Air Minum / Air Bersih

Analisis Capaian	Kendala Yang Dihadapi	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Capaian kinerja melampaui target yang ditetapkan, dengan selisih kelebihan sebesar 27,62%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam peningkatan akses layanan air minum dan air bersih berjalan sangat efektif serta memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat. Secara keseluruhan, IKU Persentase Penduduk Berakses Air Minum/Air Bersih Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025	Walaupun capaian melebihi target, dalam pelaksanaannya masih ditemui beberapa kendala, antara lain: - Sebaran permukiman penduduk yang terpencar, khususnya di wilayah pedesaan dan daerah sulit dijangkau. - Keterbatasan kapasitas sistem penyediaan air minum (SPAM) di beberapa wilayah tertentu. - Ketergantungan pada sumber air permukaan, yang kualitas dan kuantitasnya dapat	Faktor-faktor yang mendukung tingginya capaian indikator ini antara lain: - Komitmen pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya akses air minum layak. - Pembangunan dan pengembangan SPAM baik melalui jaringan perpipaan maupun sistem non-perpipaan. - Dukungan pendanaan dari pemerintah pusat dan provinsi, termasuk	Adapun faktor-faktor yang masih menjadi penghambat dalam peningkatan akses air minum/air bersih antara lain: - Keterbatasan sumber air baku yang berkelanjutan di beberapa wilayah. - Biaya operasional dan pemeliharaan yang relatif tinggi, terutama untuk sistem perpipaan. - Kapasitas kelenbagaan

dengan realisasi 80,97% telah melampaui target 53,35% secara signifikan. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas program penyediaan air minum dan air bersih. Ke depan, dipertukan penguatan pada aspek keberlanjutan layanan, kualitas air, dan pemeliharaan sarana, agar capaian yang tinggi ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.	berubah akibat musim - Tantangan operasional dan pemeliharaan sarana air bersih, terutama pada fasilitas yang dibangun di tahun-tahun sebelumnya.	program hibah dan bantuan teknis - Peran serta masyarakat, khususnya dalam pengelolaan dan pemeliharaan sarana air bersih berbasis komunitas.	pengelola air minum yang masih perlu ditingkatkan. - Risiko pencemaran sumber air, baik dari aktivitas domestik maupun lingkungan sekitar.
--	--	--	---

2. Rasio Rumah Layak Huni

Analisis Capaian	Kendala Yang Dihadapi	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan jumlah rumah yang memenuhi standar kelayakan hunian dibandingkan dengan total rumah yang ada. Hal ini mencerminkan bahwa berbagai program pemerintah dalam peningkatan kualitas perumahan masyarakat, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, telah berjalan dengan baik. Peningkatan rasio rumah layak huni ini juga dipengaruhi oleh pelaksanaan berbagai kegiatan seperti program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), bantuan stimulan perumahan swadaya, serta dukungan program perumahan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah daerah. Dengan meningkatnya jumlah rumah yang memenuhi standar kelayakan, diharapkan kualitas hidup masyarakat juga semakin meningkat.	Dalam pelaksanaan program peningkatan rumah layak huni masih terdapat beberapa kendala, antara lain: 1. Masih terdapat rumah masyarakat yang tidak memenuhi standar kelayakan hunian, terutama di wilayah pedesaan atau daerah terpencil. 2. Keterbatasan anggaran daerah untuk menjangkau seluruh rumah tidak layak huni yang ada. 3. Kondisi ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah yang terbatas sehingga sulit melakukan perbaikan rumah secara mandiri. 4. Keterbatasan data yang selalu berubah, karena adanya penambahan rumah baru atau perubahan kondisi rumah masyarakat.	Beberapa faktor yang mendukung pencapaian indikator ini antara lain: 1. Adanya program bantuan perumahan dari pemerintah pusat dan provinsi, seperti program perbaikan rumah tidak layak huni. 2. Komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas perumahan masyarakat melalui berbagai kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah. 3. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan atau perbaikan rumah secara swadaya. 4. Koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, pemerintah desa/kelurahan, serta instansi terkait dalam pelaksanaan program perumahan.	Adapun faktor yang menjadi penghambat dalam peningkatan rasio rumah layak huni antara lain: 1. Pertumbuhan jumlah rumah tangga yang cukup cepat, sehingga kebutuhan rumah layak huni terus meningkat. 2. Kondisi geografis beberapa wilayah yang sulit dijangkau, sehingga proses pembangunan atau rehabilitasi rumah menjadi lebih lambat. 3. Keterbatasan kemampuan ekonomi sebagian masyarakat untuk meningkatkan kualitas hunian secara mandiri. 4. Keterbatasan sumber daya dan pendanaan untuk menjangkau seluruh kebutuhan perbaikan rumah tidak layak huni.

3. Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Yang Tertangani

Analisis Capaian	Kendala Yang Dihadapi	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Pencapaian ini mencerminkan adanya upaya yang cukup efektif dari pemerintah daerah melalui program peningkatan kualitas permukiman, seperti pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar permukiman serta peningkatan kualitas rumah tidak layak huni. Keberhasilan ini juga menunjukkan optimalisasi penggunaan sumber daya serta koordinasi yang baik antara perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam penanganan kawasan kumuh. Dengan tercapainya realisasi yang lebih tinggi dari target, pemerintah daerah dinilai mampu mempercepat perbaikan kualitas lingkungan permukiman sehingga berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Secara keseluruhan, indikator persentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani pada tahun 2025 di Kabupaten Barito Selatan telah mencapai hasil yang sangat baik karena melampaui target yang ditetapkan. Namun demikian, pemerintah daerah tetap perlu mengatasi berbagai kendala dan faktor penghambat agar penanganan kawasan kumuh dapat dilakukan secara lebih optimal dan berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya.	1. Keterbatasan anggaran daerah yang mempengaruhi cakupan penanganan kawasan kumuh. 2. Sebaran lokasi kawasan kumuh yang sulit dijangkau, terutama pada wilayah dengan kondisi geografis yang kurang mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Masih adanya rumah tidak layak huni yang memerlukan penanganan secara bertahap. 4. Keterbatasan tenaga teknis dan pelaksana di lapangan dalam pelaksanaan pembangunan atau rehabilitasi permukiman. 5. Keterbatasan data dan pemutakhiran data kawasan kumuh yang membutuhkan verifikasi secara berkala.	1. Komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas permukiman dan kesejahteraan masyarakat. 2. Adanya program penanganan kawasan kumuh, seperti peningkatan kualitas infrastruktur permukiman (jalan lingkungan, drainase, sanitasi, dan air bersih). 3. Program peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) yang turut berkontribusi dalam pengurangan kawasan kumuh. 4. Koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah dan stakeholder dalam pelaksanaan program penataan kawasan permukiman. 5. Partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan permukiman.	1. Keterbatasan pendanaan untuk menangani seluruh kawasan kumuh secara menyeluruh. 2. Pertumbuhan permukiman baru yang tidak terencana, sehingga berpotensi menambah kawasan kumuh. 3. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih rendah sehingga kemampuan masyarakat untuk memperbaiki rumah secara mandiri terbatas. 4. Kondisi geografis dan aksesibilitas wilayah yang menyulitkan pembangunan infrastruktur permukiman. 5. Koordinasi lintas sektor yang belum optimal dalam beberapa kegiatan penataan kawasan.



4. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Analisis Capaian	Kendala Yang Dihadapi	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025, persentase rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Barito Selatan mencapai 76,20% dari target yang ditetapkan sebesar 76%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100,26%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi layak telah memenuhi bahkan sedikit melampaui target yang ditetapkan. Pencapaian ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sanitasi yang layak serta efektivitas program pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman. Berbagai program pembangunan dan peningkatan sarana sanitasi seperti pembangunan jamban sehat, septic tank, serta peningkatan sistem sanitasi rumah tangga turut berkontribusi terhadap peningkatan persentase rumah tinggal bersanitasi. Selain itu, keberhasilan capaian indikator ini juga tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah daerah, perangkat daerah terkait, serta dukungan masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan sarana sanitasi yang telah dibangun.	Dalam pelaksanaan program peningkatan sanitasi rumah tangga masih terdapat beberapa kendala, antara lain: 1. Keterbatasan anggaran pembangunan sanitasi, sehingga penanganan dilakukan secara bertahap. 2. Masih adanya rumah tangga yang belum memiliki fasilitas sanitasi layak, terutama pada wilayah perdesaan atau daerah dengan kondisi ekonomi rendah. 3. Sebagian masyarakat masih memiliki perilaku hidup bersih dan sehat yang belum optimal, termasuk kebiasaan buang air besar sembarangan. 4. Kondisi geografis dan aksesibilitas wilayah tertentu yang menyulitkan pembangunan sarana sanitasi. 5. Keterbatasan lahan pada beberapa permukiman padat, sehingga pembangunan sarana sanitasi individu menjadi lebih sulit.	1. Komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sanitasi masyarakat melalui berbagai program pembangunan sanitasi. 2. Pelaksanaan program pembangunan sarana sanitasi dasar, seperti jamban sehat, septic tank individual maupun komunal. 3. Dukungan program pemerintah pusat dan provinsi di bidang sanitasi dan kesehatan lingkungan. 4. Koordinasi antar perangkat daerah terkait, seperti dinas perumahan, dinas kesehatan, dan pemerintah desa. 5. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sanitasi yang layak untuk kesehatan lingkungan.	1. Keterbatasan kemampuan ekonomi sebagian masyarakat untuk membangun fasilitas sanitasi secara mandiri. 2. Pertumbuhan permukiman baru yang belum sepenuhnya dilengkapi sarana sanitasi layak. 3. Kondisi tanah dan lingkungan tertentu, seperti daerah rawa atau bantaran sungai yang memerlukan teknologi sanitasi khusus. 4. Masih terbatasnya sosialisasi dan edukasi sanitasi pada sebagian wilayah masyarakat. 5. Keterbatasan kapasitas pemeliharaan sarana sanitasi yang telah dibangun oleh masyarakat.

5. Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik

Analisis Capaian	Kendala Yang Dihadapi	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Capaian kinerja belum sepenuhnya memenuhi target, dengan selisih kekurangan sebesar 2,02%. Capaian ini menunjukkan bahwa program pembangunan dan pemeliharaan drainase telah berjalan, namun masih memerlukan peningkatan agar target yang ditetapkan dapat tercapai secara optimal.	Beberapa kendala yang memengaruhi pencapaian indikator ini antara lain: Curah hujan yang tinggi, yang menyebabkan sedimentasi dan kerusakan pada saluran drainase. - Banyaknya saluran drainase yang tersumbat, akibat sampah dan endapan lumpur. - Keterbatasan anggaran pemeliharaan rutin, sehingga tidak seluruh jaringan drainase dapat ditangani secara berkala. - Kondisi drainase lama yang sudah tidak sesuai kapasitas, terutama di kawasan permukiman padat.	Faktor-faktor yang mendukung pencapaian kinerja drainase antara lain: - Komitmen pemerintah daerah dalam penanganan genangan dan banjir lokal. - Pelaksanaan kegiatan normalisasi dan rehabilitasi drainase di lokasi prioritas. - Perencanaan teknis yang tersedia, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan lapangan. - Koordinasi lintas sektor, khususnya dengan perangkat daerah terkait penataan lingkungan dan kebersihan.	Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat utama adalah: • Perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah yang masih kurang mendukung fungsi drainase. • Alih fungsi lahan dan pertumbuhan kawasan terbangun, yang meningkatkan limpasan air tanpa diimbangi kapasitas drainase. • Keterbatasan sumber daya manusia dan peralatan, terutama untuk pemeliharaan rutin saluran. • Belum optimalnya sistem drainase terpadu, sehingga aliran air belum sepenuhnya terkoneksi dengan baik.

9. Meningkatnya Kapasitas Antisipasi dan Penanganan Terhadap Bencana dan Pandemi

Tabel 3.9.

Capaian Kinerja Meningkatnya Kapasitas Antisipasi dan Penanganan Terhadap Bencana dan Pandemi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian Kinerja					
			Target 2023	Realisasi	Target 2024	Realisasi	Target 2025	Realisasi
Meningkatnya Kapasitas Antisipasi dan Penanganan Terhadap Bencana dan Pandemi	Indeks Resiko Bencana	Angka	120,40	111,54	120,40	113,37	120,40	117,50

Sumber data BPBD

Indeks Resiko Bencana

Analisis Capaian	Kendala Yang Dihadapi	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya pengurangan risiko bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan telah berjalan cukup baik, namun belum sepenuhnya mencapai target yang direncanakan. Selisih sebesar 2,90 poin	1 Kondisi geografis dan karakteristik wilayah Kabupaten Barito Selatan yang rawan terhadap bencana alam seperti banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta cuaca ekstrem 2 Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan program mitigasi dan	1. Komitmen pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan dan pengurangan risiko bencana. 2. Ketersediaan regulasi dan dokumen perencanaan, seperti rencana penanggulangan bencana daerah dan dokumen kajian risiko	1. Tingginya intensitas dan frekuensi kejadian bencana yang sulit diprediksi dan dikendalikan. 2. Keterbatasan sarana dan prasarana kebencanaan, khususnya di wilayah terpencil dan rawan bencana.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025

mengindikasikan masih adanya tantangan dalam pengendalian faktor risiko bencana, terutama yang dipengaruhi oleh kondisi alam dan keterbatasan kapasitas penanggulangan bencana di tingkat daerah. Secara umum, nilai realisasi IRB yang lebih rendah dari target mencerminkan bahwa tingkat risiko bencana masih relatif tinggi dan memerlukan penguatan kebijakan serta intervensi yang lebih terintegrasi. Secara keseluruhan, capaian Indeks Risiko Bencana Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang cukup baik, namun masih memerlukan penguatan strategi mitigasi, peningkatan kapasitas, serta sinergi lintas sektor agar target yang ditetapkan dapat tercapai secara optimal di tahun-tahun mendatang.	pengurangan risiko bencana secara menyeluruh. 3 Kapasitas sumber daya manusia dalam bidang kebencanaan yang masih perlu ditingkatkan, baik dari sisi teknis maupun perencanaan. 4 Koordinasi lintas sektor yang belum optimal, terutama dalam integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan daerah. 5 Partisipasi masyarakat dalam upaya mitigasi bencana yang masih relatif rendah di beberapa wilayah.	bencana. 3. Dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi, baik dalam bentuk pendampingan teknis maupun bantuan logistik dan peralatan. 4. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait, seperti BPED TN/Polri, serta lembaga sosial dan relawan kebencanaan. 5. Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi kebencanaan, meskipun masih perlu diperluas cakupannya.	3. Belum optimalnya integrasi pengurangan risiko bencana dalam program pembangunan sektor lain. 4. Perubahan iklim yang meningkatkan potensi risiko bencana hidrometeorologi. 5. Keterbatasan data dan sistem informasi kebencanaan yang akurat dan mutakhir sebagai dasar pengambilan kebijakan.
--	---	---	---

10. Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah

Tabel 3.10.

Capaian Kinerja Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian Kinerja					
			Target 2023	Realisasi	Target 2024	Realisasi	Target 2025	Realisasi
Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Persen	92	88,4	95	92,06	97	89,25

Sumber data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Barito Selatan

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

Analisis Capaian	Kendala Yang Dihadapi	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Pada Tahun 2025, Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Kabupaten Barito Selatan ditargetkan sebesar 97, namun realisasi yang dicapai sebesar 89,25. Dengan demikian, tingkat pencapaian kinerja berada pada kisaran 92,01% dari target yang telah ditetapkan.	Beberapa kendala utama yang memengaruhi belum tercapainya target Skor PPH Konsumsi antara lain: 1. Pola konsumsi masyarakat yang masih cenderung monoton, terutama ketergantungan pada satu atau dua jenis pangan pokok. 2. Daya beli masyarakat yang terbatas, sehingga	Adapun faktor-faktor yang mendukung pencapaian Skor PPH Konsumsi antara lain: 1. Komitmen pemerintah daerah dalam mendukung ketahanan pangan dan perbaikan gizi masyarakat. 2. Tersedianya program dan kegiatan terkait diversifikasi pangan dan	Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian target Skor PPH Konsumsi meliputi: 1. Budaya dan kebiasaan konsumsi yang sulit berubah dalam waktu singkat. 2. Keterbatasan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pola konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Barito Selatan belum sepenuhnya beragam bergizi seimbang, dan aman sesuai dengan standar Pola Pangan Harapan. Selisih sebesar 7,75 poin dari target mengindikasikan masih dominannya konsumsi pangan sumber karbohidrat tertentu, serta belum optimalnya konsumsi pangan sumber protein hewani, sayur, dan buah. Secara umum, capaian ini mencerminkan bahwa upaya diversifikasi konsumsi pangan sudah berjalan, namun belum optimal dan memerlukan penguatan intervensi lintas sektor. Secara keseluruhan, capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang cukup baik, namun masih terdapat kesenjangan yang signifikan dibandingkan target yang ditetapkan. Diperlukan penguatan edukasi gizi, peningkatan akses pangan bergizi, serta optimalisasi pemanfaatan pangan lokal agar target PPH Konsumsi dapat tercapai secara optimal di tahun-tahun mendatang.	konsumsi pangan bergizi dan beragam belum menjadi prioritas utama. 3. Akses terhadap pangan bergizi, khususnya protein hewani, sayur, dan buah, yang belum merata di seluruh wilayah. 4. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya gizi seimbang dan diversifikasi pangan. 5. Perubahan harga pangan yang fluktuatif dan berdampak pada pilihan konsumsi rumah tangga.	konsumsi pangan lokal. 3. Dukungan lintas sektor, termasuk perangkat daerah yang menangani pangan, kesehatan, dan pendidikan. 4. Potensi sumber daya pangan lokal yang beragam dan dapat dikembangkan sebagai alternatif pangan. 5. Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi gizi, meskipun masih perlu ditingkatkan intensitas dan jangkauannya.	distribusi dan infrastruktur pangan, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil. 3. Ketergantungan pada pasokan pangan dari luar daerah, yang memengaruhi ketersediaan dan harga. 4. Dampak perubahan iklim yang berpengaruh terhadap produksi pangan lokal. 5. Keterbatasan data konsumsi pangan rumah tangga yang akurat dan berkelanjutan sebagai dasar perumusan kebijakan.
--	--	---	--

11. Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Yang Akuntabel

Tabel 3.11.
Capaian Kinerja Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan
yang Akuntabel

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian Kinerja					
			Target 2023	Realisasi	Target 2024	Realisasi	Target 2025	Realisasi
Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel	1. Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Dalam Proses
	2. Indeks Pencegahan	Indeks	80,00	76,54	72,92	71,66	80	78



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025

	Korupsi/Monitoring Control for Prevention (MCP) KPK							
	3. Nilai SAKIP	Kriteria	B	B	B	B	B	B
	4. Nilai LPPD	Kriteria	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi (3,6358)	Sedang	Dalam Tahap Penyusunan Laporan
	5. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Persen	5,00	3,4	6,00	3,4	7,00	8,20

Sumber data Inspektorat Daerah, Bag Organisasi Setda dan BPKAD Kab. Barito Selatan

1. Opini BPK masih dalam tahap pemeriksaan
2. Indeks Pencegahan Korupsi / Monitoring Control of Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Analisis Capaian	Kendala Yang Dihadapi	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Kabupaten Barito Selatan belum mencapai target yang ditetapkan dalam indikator pencegahan korupsi, meskipun selisihnya relatif kecil. Skor 78 menunjukkan bahwa upaya pencegahan korupsi di daerah sudah relatif baik, namun belum optimal memenuhi standar indikator MCP KPK2025. Daerah telah menerapkan sebagian besar mekanisme pencegahan korupsi sesuai indikator (misalnya perencanaan, administrasi, manajemen ASN pengawasan internal). Skor di bawah target berarti ada ruang perbaikan di beberapa area agar tata kelola pemerintahan semakin bersih, transparan, dan akuntabel. Untuk mencapai target 80 ke atas, fokus utama yang perlu diperkuat antara lain: - Konsolidasi pemahaman dan pelatihan MCP	Beberapa tantangan yang umum terjadi di daerah, termasuk kemungkinan yang juga dialami Barito Selatan: - Struktural dan Sistem Penyesuaian pelaporan dokumen MCP belum sempurna, karena indikator 2025 lebih komprehensif dan beragam (mis. 111 sub-indikator). - Integrasi antar unit kerja belum maksimal, menyebabkan beberapa area pencapaian tertinggal. - Internal Organisasi Kapasitas SDM mengelola data dan laporan MCP masih perlu peningkatan, seperti pemahaman terhadap pengisian dokumen dan penggunaan platform MCP. - Resistensi budaya kerja lama, yang belum sepenuhnya berubah ke arah tata kelola yang transparan dan akuntabel. - Teknis & Administratif	Beberapa kondisi yang mendorong MCP Barito Selatan bisa mendekati target: - Komitmen Pimpinan Daerah Kepemimpinan yang aktif mendorong pencegahan korupsi pada setiap OPD dan unit kerja. - Penguatan Sistem Tata Kelola Penataan regulasi internal, SOP, dan mekanisme kerja yang lebih transparan dan berbasis akuntabilitas. - Kolaborasi Internal Koordinasi yang baik antara inspektorat, BPKAD, Bappeda, BPKP (jika dilibatkan), dan unit kerja lain dalam memenuhi indikator. - Pemantauan Berkala Evaluasi dan rapat koordinasi secara rutin untuk memonitor progres MCP.	- Keterbatasan SDM dan Sumber Daya Jumlah personel yang memahami indikator MCP masih terbatas. Alokasi anggaran untuk penguatan kapabilitas pengawasan internal dan pelatihan MCP minim. - Budaya Organisasi Kebiasaan lama dan kurangnya pemahaman menyeluruh tentang kebijakan anti-korupsi bisa menghambat. - Implementasi di Beberapa Area Spesifik Area yang sering bermasalah secara nasional adalah pengadaan barang dan jasa, optimalisasi pajak daerah, dan pengawasan internal (APIP) yang memerlukan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025

- Peningkatan sistem dokumentasi bukti pencapaian - Penguatan fungsi pengawasan internal (APIP) - Rapat koordinasi berkala tentang pemenuhan semua delapan area MCP.	Pengawasan APIP atau internal control tertentu kurang konsisten, sehingga beberapa pengukuran belum optimal. Dokumentasi bukti pencapaian belum lengkap, yang sering mempengaruhi skor akhir.		perhatian lebih lanjut. - Pemanfaatan Sistem MCP Kemampuan teknis dalam menggunakan aplikasi MCP KPK (dalam upload dokumen, pemetaan risiko, evaluasi) perlu peningkatan agar semua indikator terukur secara lengkap dan akurat.
--	---	--	--

3. Nilai SAKIP

Sebagaimana surat Kementerian PANRB Nomor : B/391/AA.05/2025 tanggal 29 Desember 2025 hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025. Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Selatan menunjukkan nilai sebesar **61,34** dengan predikat **“B”**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi SAKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan pada prinsipnya menerima catatan dan rekomendasi hasil evaluasi SAKIP yang disampaikan melalui Portal RB Nasional dan akan ditindaklanjuti. Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sanggahan ini disampaikan untuk memberikan klarifikasi atas beberapa poin yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dan tetap berkomitmen untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan cascading kinerja, memperkuat pengukuran kinerja berbasis outcome, menyempurnakan analisis dalam Laporan Kinerja sesuai kaidah Permenpanrb 53/2014 dan mengoptimalkan pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025

4. Nilai LPPD

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Barito Selatan masih dalam proses penyusunan laporan.

5. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Analisis Capaian	Kendala Yang Dihadapi	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Pada Tahun 2025, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Barito Selatan ditargetkan sebesar 7,00%, sedangkan realisasinya mencapai 8,20%. Dengan demikian, capaian kinerja indikator ini mencapai sekitar 117,14% dari target. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Rasio ini mengindikasikan bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah atau terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi semakin membaik, meskipun secara umum tingkat kemandirian keuangan daerah masih tergolong rendah karena ketergantungan terhadap dana transfer masih cukup besar. Pencapaian realisasi yang melampaui target juga mencerminkan adanya optimalisasi pemungutan PAD serta peningkatan pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah, baik dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, maupun lain-lain PAD yang sah.	Dalam upaya peningkatan rasio kemandirian keuangan daerah, beberapa kendala yang masih dihadapi antara lain: 1. Basis PAD yang masih terbatas, terutama karena struktur ekonomi daerah yang belum sepenuhnya berkembang dan masih bergantung pada sektor tertentu. 2. Potensi pajak dan retribusi daerah yang belum tergali secara optimal, baik dari sisi pendataan objek pajak maupun kepatuhan wajib pajak. 3. Keterbatasan sarana, prasarana, dan sistem pengelolaan pendapatan daerah, termasuk sistem digitalisasi pemungutan yang belum sepenuhnya optimal. 4. Ketergantungan yang masih tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, sehingga kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih relatif kecil.	1. Peningkatan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD oleh perangkat daerah pengelola pendapatan. 2. Adanya peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah. 3. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah yang memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah. 4. Dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam memperkuat pengelolaan keuangan daerah serta peningkatan pengawasan terhadap penerimaan daerah. 5. Pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat, yang turut mendorong peningkatan penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah.	1. Struktur perekonomian daerah yang belum kuat dan belum terdiversifikasi, sehingga potensi PAD relatif terbatas. 2. Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi lokal yang dapat menjadi sumber pendapatan daerah baru. 3. Masih rendahnya kontribusi BUMD terhadap PAD. 4. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan pendapatan daerah, khususnya dalam penggalian potensi PAD dan inovasi pendapatan. 5. Adanya kebijakan regulasi tertentu dari pemerintah pusat yang membatasi ruang daerah dalam menetapkan jenis dan tarif pajak maupun retribusi daerah.

12. Meningkatnya Kualitas Inovasi dan Pelayanan Masyarakat

Tabel 3.12.

Capaian Kinerja Kualitas Inovasi dan Pelayanan Masyarakat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian Kinerja					
			Target 2023	Realisasi	Target 2024	Realisasi	Target 2025	Realisasi
Meningkatnya Kualitas Inovasi dan Pelayanan Masyarakat	1. Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Inovatif	Inovatif (53,36)	Inovatif	Inovatif (54,80)	Inovatif	Inovatif (61,78)
	3. Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	80	83,80	80	84,07	80	85,44

Sumber data Bapperida dan Setda Kab. Barito Selatan

1. Indeks Inovasi Daerah

Analisis Capaian	Kendala Yang Dihadapi	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Kabupaten Barito Selatan berhasil mencapai status <i>Inovatif</i> dalam pengukuran indeks inovasi. Ini menunjukkan tingginya kemampuan daerah dalam menciptakan, mengelola, dan menerapkan inovasi yang berdampak pada pelayanan publik dan pembangunan daerah. Keberhasilan ini tidak terlepas dari Keterlibatan OPD, masyarakat, perguruan tinggi, dan sektor swasta dalam program inovasi. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 400.10.11-6097 Tahun 2025 tanggal 9 Desember 2025 Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2025	Meskipun realisasi Inovatif, terdapat beberapa kendala internal dan eksternal yang dihadapi : 1. Kendala Internal - Keterbatasan Sumber Daya - o Anggaran inovasi belum mencukupi. - o Kapasitas SDM di beberapa OPD masih rendah. - Resistensi terhadap perubahan - o Sebagian pegawai belum adaptif terhadap proses inovatif. - Koordinasi antar OPD belum optimal - o Inovasi cenderung berjalan sektoral, belum terintegrasi. 2. Kendala Eksternal - Akses teknologi di daerah terpencil - o Konektivitas atau infrastruktur digital belum merata. - Partisipasi masyarakat terkadang masih rendah. Kurangnya sosialisasi, sehingga inovasi kurang dipahami luas. - Kolaborasi dengan pihak eksternal. Belum maksimalnya kerja sama dengan universitas, komunitas, atau sektor swasta.	- Komitmen Pimpinan Daerah Bupati dan jajaran mendukung kebijakan inovasi secara nyata. - Sistem Penghargaan/ Insentif Internal Reward bagi OPD atau ASN yang menciptakan inovasi. - SOP dan Mekanisme Inovasi yang Jelas - Terbentuknya unit atau tim khusus inovasi (mis UPT/TPD/Innovation Lab). - Kolaborasi dengan Stakeholder - Sinergi dengan perguruan tinggi atau komunitas lokal. - Dukungan Masyarakat Partisipasi aktif warga dalam perumusan atau uji coba inovasi. - Faktor Ekonomi & Teknologi Meningkatnya akses internet dan penggunaan digital dalam kegiatan sehari-hari.	- Struktural Birokrasi yang masih kompleks. Prosedur panjang dalam pengesahan inovasi baru. - Sumber Daya Keterbatasan anggaran alokasi inovasi Dana untuk riset pengembangan dan pelatihan minim - SDM yang belum merata kompetensinya. Beberapa OPD unggul inovasi, namun banyak yang belum. - Kolaborasi. Belum optimalnya jejaring eksternal. Kerja sama dengan sektor lain belum terjadwal terstruktur.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat

Analisis Capaian	Kendala Yang Dihadapi	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Pada Tahun 2025, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Barito Selatan ditargetkan sebesar 80%, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 85,44%. Dengan demikian tingkat capaian kinerja indikator ini mencapai sekitar 106,80% dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh perangkat daerah kepada masyarakat mengalami peningkatan dan mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Nilai IKM yang berada pada angka 85,44% mengindikasikan bahwa secara umum masyarakat memberikan penilaian baik terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah, baik dari aspek prosedur pelayanan, kecepatan pelayanan, kompetensi petugas, sarana dan prasarana pelayanan, maupun sikap petugas pelayanan. Peningkatan nilai IKM ini juga mencerminkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam melakukan perbaikan tata kelola pelayanan publik, termasuk melalui penyederhanaan prosedur pelayanan, peningkatan transparansi, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.	Meskipun capaian kinerja telah melampaui target, dalam pelaksanaan pelayanan publik masih terdapat beberapa kendala, antara lain: 1. Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan di beberapa unit layanan, terutama yang berada di wilayah kecamatan atau desa yang jauh dari pusat pemerintahan. 2. Keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia pada unit pelayanan tertentu, sehingga mempengaruhi kecepatan dan kualitas pelayanan. 3. Belum meratanya penerapan digitalisasi pelayanan publik di seluruh perangkat daerah. 4. Masih adanya persepsi masyarakat yang beragam terhadap standar pelayanan, sehingga tingkat kepuasan belum merata di semua jenis layanan.	Beberapa faktor yang mendukung tercapainya realisasi IKM melampaui target antara lain: 1. Komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui berbagai kebijakan reformasi birokrasi. 2. Penerapan standar pelayanan dan standar operasional prosedur (SOP) pada unit-unit pelayanan. 3. Peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan dan pembinaan di bidang pelayanan publik. 4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pelayanan, seperti sistem pelayanan berbasis elektronik pada beberapa layanan perizinan dan administrasi. 5. Adanya mekanisme pengaduan masyarakat yang memungkinkan perbaikan pelayanan secara berkelanjutan.	Adapun beberapa faktor yang masih menjadi penghambat dalam peningkatan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat, antara lain: 1. Keterbatasan anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik secara merata. 2. Belum optimalnya integrasi sistem pelayanan berbasis digital antar perangkat daerah. 3. Masih adanya kesenjangan kualitas pelayanan antara unit layanan di pusat pemerintahan dan di wilayah kecamatan. 4. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan yang masih beragam sehingga terkadang mempengaruhi persepsi terhadap kualitas pelayanan.

Tabel 3.13.
Capaian Kinerja Meningkatnya Pengembangan e-Government Menuju Smart City

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian Kinerja					
			Target 2023	Realisasi	Target 2024	Realisasi	Target 2025	Realisasi
Meningkatnya Pengembangan e-Government Menuju Smart City	Indeks SPBE	Indeks	2,60	3,19	2,80	3,20	2,80	3,67

Sumber data Dinas Kominfo Kab. Barito Selatan

Indeks SPBE

Analisis Capaian	Kendala Yang Dihadapi	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Dengan demikian, capaian Indeks SPBE melampaui target yang ditetapkan, dengan selisih peningkatan sebesar 0,87 poin. Capaian ini menunjukkan adanya kemajuan signifikan dalam penerapan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, baik dari aspek kebijakan, tata kelola, manajemen, maupun layanan digital kepada masyarakat. Secara keseluruhan, Indeks SPBE Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 dengan realisasi 3,67 telah melampaui target 2,80 secara signifikan. Capaian ini mencerminkan keberhasilan transformasi digital pemerintahan daerah. Ke depan, fokus perlu diarahkan pada penguatan integrasi sistem, peningkatan kapasitas SDM TIK, serta keberlanjutan infrastruktur dan keamanan informasi, agar kualitas layanan digital dapat terus ditingkatkan.	Meskipun capaian melebihi target, dalam pelaksanaan SPBE masih terdapat beberapa kendala, antara lain: - Keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), terutama di wilayah yang belum terjangkau jaringan internet secara optimal. - Kesenjangan kompetensi SDM Aparatur dalam pemanfaatan dan pengelolaan aplikasi berbasis elektronik. - Integrasi sistem aplikasi antar perangkat daerah yang belum sepenuhnya optimal. - Keterbatasan anggaran pemeliharaan dan pengembangan sistem TIK, khususnya untuk peningkatan keamanan dan kapasitas sistem.	Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian Indeks SPBE antara lain: - Komitmen pimpinan daerah dalam mendorong transformasi digital pemerintahan. - Tersedianya regulasi dan kebijakan pendukung SPBE, termasuk arsitektur SPBE daerah. - Pengembangan dan pemanfaatan aplikasi layanan pemerintahan dan publik, baik internal maupun eksternal. - Koordinasi antar perangkat daerah, khususnya dalam pengelolaan data dan sistem informasi.	Adapun faktor-faktor yang masih menjadi penghambat dalam peningkatan Indeks SPBE antara lain: - Ketergantungan pada sistem/aplikasi yang belum terstandarisasi, sehingga menyulitkan integrasi. - Keterbatasan SDM TIK yang memiliki kompetensi teknis lanjutan, seperti keamanan siber dan manajemen data. - Risiko keamanan informasi dan perlindungan data, yang memerlukan perhatian dan investasi lebih lanjut. - Perubahan teknologi yang cepat, menuntut penyesuaian berkelanjutan dalam perencanaan dan implementasi SPBE.

14. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat

Tabel 3.14.
Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian Kinerja					
			Target 2023	Realisasi	Target 2024	Realisasi	Target 2025	Realisasi
Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat	Indeks Pembangunan Keluarga (ibangga)	Indeks	33,36	62,51	34,45	61,98	59	62,6

Sumber data Dinas PPPAPKB Kab. Barito Selatan

Indeks Pembangunan Keluarga (ibangga)

Analisis Capaian	Kendala Yang Dihadapi	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Pada Tahun 2025, Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Barito Selatan ditargetkan sebesar 59, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 62,6. Dengan demikian, tingkat pencapaian kinerja mencapai sekitar 106,1% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa pembangunan keluarga di Kabupaten Barito Selatan berjalan sangat baik dan melampaui target yang direncanakan. Peningkatan nilai iBangga mencerminkan perbaikan pada dimensi ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga, yang dipengaruhi oleh meningkatnya akses layanan keluarga berencana, kesehatan keluarga, pendidikan, serta perlindungan sosial.	Meskipun capaian kinerja telah melampaui target, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain: 1. Perbedaan capaian antarwilayah, terutama antara wilayah perkotaan dan pedesaan. 2. Keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM pendamping keluarga dan tenaga penyuluh KB 3. Mobilitas penduduk yang cukup tinggi sehingga menyulitkan pemutakhiran data keluarga. 4. Tingkat literasi keluarga terkait pengasuhan, kesehatan reproduksi, dan perencanaan keluarga yang belum merata. 5. Keterbatasan anggaran untuk memperluas cakupan intervensi pembangunan keluarga.	Faktor-faktor yang mendukung tercapainya bahkan melampaui target iBangga antara lain: 1. Komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendukung program pembangunan keluarga. 2. Sinergi lintas sektor antara perangkat daerah, BKKB dan mitra terkait. 3. Implementasi program strategis, seperti pendampingan keluarga, program KB dan penurunan stunting. 4. Partisipasi masyarakat dan kader yang cukup aktif dalam kegiatan pembangunan keluarga. 5. Pemanfaatan data keluarga sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan.	Adapun faktor-faktor yang masih menjadi penghambat dalam peningkatan iBangga ke depan, antara lain: 1. Kondisi geografis wilayah yang menyulitkan jangkauan layanan pendampingan keluarga. 2. Kesenjangan akses layanan dasar, khususnya kesehatan dan pendidikan di wilayah terpencil. 3. Perubahan sosial dan ekonomi, yang berpengaruh terhadap stabilitas dan ketahanan keluarga. 4. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pembangunan keluarga. 5. Ketergantungan pada dukungan pendanaan eksternal untuk program-program tertentu.

15. Meningkatkan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 3.15.

Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian Kinerja					
			Target 2023	Realisasi	Target 2024	Realisasi	Target 2025	Realisasi
Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92,10		92,10	93,00	92,95	93,12

Sumber data Dinas PPPAPKB Kab. Barito Selatan

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Analisis Capaian	Kendala Yang Dihadapi	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Barito Selatan mencapai 93,12.	1. Masih terdapat kesenjangan akses terhadap kesempatan ekonomi antara laki-laki dan perempuan di beberapa sektor.	1. Komitmen pemerintah daerah dalam mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan dan pelaksanaan	1. Masih adanya stereotip gender yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam

melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 92,95, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100,18%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam mendorong kesetaraan gender dalam berbagai aspek pembangunan telah berjalan dengan baik. Peningkatan IPG mencerminkan semakin kecilnya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta kesempatan ekonomi. Keberhasilan capaian ini juga menunjukkan adanya peningkatan kualitas hidup perempuan yang relatif seimbang dengan laki-laki dalam proses pembangunan daerah. Selain itu, capaian ini tidak terlepas dari berbagai kebijakan dan program pemerintah daerah yang mendukung pengarusutamaan gender, seperti peningkatan akses pendidikan bagi perempuan, peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, serta pemberdayaan ekonomi perempuan melalui berbagai kegiatan pelatihan dan pengembangan usaha.	- Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di beberapa bidang pembangunan masih relatif terbatas. - Keterbatasan data terpilah gender pada beberapa sektor pembangunan yang diperlukan untuk perencanaan program yang lebih tepat sasaran. - Masih adanya norma sosial dan budaya yang mempengaruhi peran perempuan dalam aktivitas ekonomi dan sosial. - Keterbatasan kapasitas kelenbagaan dalam implementasi program pengarusutamaan gender di seluruh perangkat daerah.	pembangunan. - Pelaksanaan program pemberdayaan perempuan, seperti pelatihan keterampilan, pengembangan usaha mikro, dan peningkatan kapasitas perempuan. - Peningkatan akses pendidikan bagi perempuan, yang berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia perempuan. - Peningkatan layanan kesehatan, khususnya bagi perempuan dan anak. - Kerja sama lintas sektor dan dukungan berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat dan lembaga terkait dalam mendorong kesetaraan gender.	berbagai sektor pembangunan. - Keterbatasan akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi, seperti modal usaha dan kesempatan kerja. - Belum optimalnya implementasi pengarusutamaan gender di seluruh perangkat daerah. - Tingkat pendidikan dan keterampilan sebagian perempuan yang masih perlu ditingkatkan. - Terbatasnya dukungan anggaran khusus untuk program-program yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.
--	---	--	---

B. Prioritas Pembangunan Tahun 2025

Tema dari RKP Tahun 2025 adalah: ***“Mendorong terwujudnya iklim investasi daerah yang kondusif, disertai dengan pemantapan pembangunan jaringan infrastruktur utk peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan”***. Pembangunan Nasional diarahkan pada 7 (tujuh) arah kebijakan prioritas, yang meliputi :



1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal kesehatan dan pendidikan;
3. Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan *decent job*;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas;
6. Ekonomi hijau; dan
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar.

Sedangkan untuk Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2025 adalah:

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomi untuk Kalteng Bermartabat;
2. Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata, pengembangan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok;
3. Pengembangan rumah ibadah, institusi Pendidikan keagamaan dan komunitas adat, Memperluas pengiriman tokoh-tokoh lintas agama dan Meningkatkan insentif khusus bagi guru-guru Sekolah Keagamaan Untuk Kalteng Religius;
4. Mempercepat pengembangan Kawasan Industri, Ekonomi dan Food Estate, Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan



Pendidikan dan peningkatan Kesehatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat;

5. Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi, keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah; dan
6. Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni.

Memperhatikan arah dan sasaran pembangunan baik yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi diatas, maka tema pembangunan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 adalah:

“Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas untuk pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan dan membuka kesempatan kerja yang luas”.

Tema Pembangunan diatas, merupakan tema tahun kelima dari RPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026. Tema pembangunan tahun ini akan kita maknai sebagai upaya untuk mendukung pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional di semua aspek, baik yang menyangkut infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, keamanan dan ketertiban umum, sosial, perumahan dan permukiman, Ketahanan Pangan, pertanian, perikanan, Ekonomi Hijau, penyediaan lapangan kerja, dan UMKM



melalui upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal setempat, sembari kita juga akan melakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang handal dan berdaya saing dengan peningkatan pada bidang pendidikan dan kesehatan.

Dalam rangka mendukung peningkatan Inovasi Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan juga berupaya mendukung Inovasi-Inovasi yang ada di Kabupaten Barito Selatan. Saat ini ada 2 (dua) Inovasi yang menjadi unggulan, yaitu SIMDATIK (Sistem Informasi Data Statistik) yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika dan SIGERA (Sistem Informasi Geoportal Daerah) yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

C. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Barito Selatan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Sasaran dan Prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, serta Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Barito Selatan. Hubungan dari masing-masing Prioritas Pembangunan tersebut dapat dilihat sebagaimana Tabel dibawah ini :





Tabel 3.16.
Hubungan dan Sinkronisasi
Prioritas Pembangunan

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	PRIORITAS KABUPATEN BARITO SELATAN
Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.	Mempercepat pengembangan Kawasan Industri, Ekonomi dan Food Estate, Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat.	Mendukung pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional di semua aspek, baik yang menyangkut infrastruktur, pendidikan, kesehatan, keamanan dan ketertiban umum, sosial, perumahan dan permukiman, Ketahanan Pangan, pertanian, perikanan, Ekonomi Hijau, penyediaan lapangan kerja, dan UMKM melalui upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal setempat.
Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan <i>decent job</i> .		
Mendorong pemulihan dunia usaha.		
Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan Dalam rangka mendorong produktivitas.		
Ekonomi hijau	Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata, pengembangan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok.	
Percepatan pembangunan infrastruktur dasar.	Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomi untuk Kalteng Bermartabat.	
Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal kesehatan dan pendidikan	1. Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi, keterbukaan kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah; 2. Pengembangan rumah ibadah, institusi Pendidikan keagamaan dan komunitas adat, Memperluas pengiriman tokoh-tokoh lintas agama dan Meningkatkan insentif khusus bagi guru-guru Sekolah Keagamaan Untuk Kalteng Religius; 3. Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni.	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang handal dan berdayasaing dengan peningkatan pada bidang pendidikan dan kesehatan



D. Realisasi Anggaran Tahun 2025

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025 terhadap program dan kegiatan prioritas dalam mendukung capaian kinerja Bupati selaku Kepala Daerah sebagaimana yang disampaikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagai berikut :

Tabel 3.17.

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Untuk Tahun Berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN					
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI)					
TAHUN ANGGARAN 2025					
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025					
Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	1,648,597,165,175.23	1,544,823,471,570.08	93.70	1,831,871,547,012.98
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	120,216,516,022.23	111,047,966,980.08	92.37	71,397,521,080.98
41.01	Pajak Daerah	46,198,637,522.00	37,667,513,589.55	81.53	14,168,868,108.32
41.01.06	Pajak Hotel	92,710,000.00	78,710,000.00	84.89	80,182,000.00
41.01.07	Pajak Restoran	6,000,000,000.00	4,762,137,376.00	79.36	4,230,780,408.00
41.01.08	Pajak Hiburan	21,250,000.00	0.00	0.00	2,857,000.00
41.01.09	Pajak Reklame	516,173,776.00	267,056,070.00	51.73	146,335,569.00
41.01.10	Pajak Penerangan Jalan	9,000,000,000.00	6,279,322,586.00	69.77	5,688,575,834.00
41.01.11	Pajak Parkir	55,716,400.00	52,704,800.00	94.59	36,682,800.00
41.01.12	Pajak Air Tanah	25,000,000.00	2,186,713.57	8.74	600,000.00
41.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	15,000,000.00	15,515,000.00	103.43	5,500,000.00
41.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	9,585,779,071.00	9,268,224,049.98	96.68	392,895,700.32
41.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	1,777,984,082.00	1,207,668,963.00	67.92	950,720,547.00
41.01.16	Beban Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (EPHTB)	7,636,270,266.00	4,697,168,031.00	61.51	2,633,738,250.00
41.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	5,663,095,164.00	5,034,464,400.00	88.89	0.00
41.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	5,809,658,763.00	6,002,355,600.00	103.31	0.00
41.02	Retribusi Daerah	9,225,095,685.00	5,614,642,890.00	60.86	4,768,725,847.00
41.02.01	Retribusi Jasa Umum	2,621,004,470.00	1,871,541,260.00	71.40	1,766,743,330.00
41.02.02	Retribusi Jasa Usaha	4,574,091,215.00	3,323,048,497.00	72.64	2,695,014,950.00
41.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	2,030,000,000.00	420,053,133.00	20.69	306,967,567.00
41.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4,521,318,992.00	3,756,648,302.31	83.08	4,522,022,594.50
41.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	4,521,318,992.00	3,756,648,302.31	83.08	0.00
41.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	0.00	0.00	0.00	4,522,022,594.50
41.04	Lain-lain PAD yang Sah	60,271,463,823.23	64,009,162,198.22	106.20	47,937,904,531.16
41.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	3,000,000.00	21,315,900.00	710.53	73,736,465.00
41.04.05	Jasa Giro	4,062,411,736.00	3,035,098,108.00	74.71	2,684,333,661.00
41.04.07	Pendapatan Bunga	226,614,746.30	7,194,031.91	3.17	5,567,658.22
41.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
41.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	6,866,443,555.93	6,183,082,918.17	90.04	4,758,729,505.38
41.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	150,000,000.00	149,405,491.00	99.60	74,873,907.00
41.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	22,500,000.00	30,992,360.00	137.74	14,991,587.00
41.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	13,142,000,000.00	10,520,768,210.14	80.05	4,853,769,245.56
41.04.16	Pendapatan BLUD	35,798,493,785.00	44,061,305,179.00	123.08	35,466,702,502.00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	120,216,516,022.23	111,047,966,980.08	92.37	71,397,521,080.98
42	PENDAPATAN TRANSFER	1,286,584,463,942.00	1,354,777,004,708.00	105.30	1,755,756,146,629.00
42.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,228,684,996,740.00	1,278,492,792,093.00	104.05	1,695,089,321,535.00
42.01.01	Dana Perimbangan	0.00	0.00	0.00	146,518,271,006.00
42.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	497,539,368,740.00	620,385,167,900.00	124.69	876,826,718,201.00
42.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	515,686,582,000.00	483,563,006,552.00	93.77	591,322,819,252.00
42.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	146,280,903,000.00	122,028,829,241.00	83.42	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	1,159,506,853,740.00	1,225,977,003,693.00	105.73	1,614,667,808,459.00
42.01.05	Dana Desa	69,178,143,000.00	52,515,788,400.00	75.91	73,702,409,076.00
42.01.06	Insentif Fiskal	0.00	0.00	0.00	6,719,104,000.00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAIN LAIN	69,178,143,000.00	52,515,788,400.00	75.91	80,421,513,076.00
42.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	57,899,467,202.00	76,284,212,615.00	131.75	60,666,825,094.00
42.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	57,899,467,202.00	75,848,612,615.00	131.00	60,666,825,094.00
42.02.02	Bantuan Keuangan	0.00	435,600,000.00	0.00	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	57,899,467,202.00	76,284,212,615.00	131.75	60,666,825,094.00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	1,286,584,463,942.00	1,354,777,004,708.00	105.30	1,755,756,146,629.00
43	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	241,796,185,211.00	78,998,499,882.00	32.67	4,717,879,303.00
43.01	Pendapatan Hibah	12,577,505,043.00	0.00	0.00	138,000,000.00
43.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	12,577,505,043.00	0.00	0.00	138,000,000.00
43.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	229,218,680,168.00	78,998,499,882.00	34.46	4,579,879,303.00
43.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	8,506,461,519.00	5,557,564,818.00	65.33	4,579,879,303.00
43.03.04	Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat	219,711,280,309.00	72,934,490,064.00	33.19	0.00
43.03.05	Pendapatan Maim Pelayanan Kesehatan/Nonkapitasi	1,000,938,340.00	506,445,000.00	50.59	0.00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	241,796,185,211.00	78,998,499,882.00	32.67	4,717,879,303.00
	JUMLAH PENDAPATAN	1,648,597,165,175.23	1,544,823,471,570.08	93.70	1,831,871,547,012.98



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025

5	BELANJA DAERAH	1,796,752,649,820.00	1,640,120,612,668.86	91.28	1,766,754,474,549.70
5.1	BELANJA OPERASI	1,075,083,720,236.50	959,174,446,046.86	89.21	1,020,479,418,028.50
5.1.01	Belanja Pegawai	549,588,376,375.41	474,379,770,098.06	86.31	467,108,645,972.00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	350,237,928,712.92	325,059,874,254.00	92.81	284,769,984,818.00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	187,008,428,729.49	137,129,090,386.06	73.32	98,731,631,085.00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif	0.00	0.00	0.00	73,453,351,290.00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	11,262,821,594.00	11,188,624,040.00	99.34	9,735,263,279.00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan K/H/WMDH	477,597,339.00	420,581,418.00	88.06	10,415,500.00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta K/H/WMDH	601,600,000.00	581,600,000.00	96.67	408,000,000.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	468,486,267,861.09	430,364,975,906.80	91.86	447,961,452,752.50
5.1.02.01	Belanja Barang	74,939,910,581.45	69,792,128,687.00	93.13	74,286,697,231.00
5.1.02.02	Belanja Jasa	203,654,589,751.00	182,425,884,782.00	89.57	193,396,054,362.00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	40,126,146,418.00	38,508,831,804.10	95.96	21,255,407,819.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	87,401,137,025.64	79,981,430,712.00	91.51	89,840,941,375.00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Masyarakat	6,758,160,300.00	5,266,592,819.00	77.92	10,656,646,580.00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	0.00	0.00	0.00	26,537,320,373.00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	21,682,830,000.00	11,242,889,621.00	51.85	0.00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	33,923,493,785.00	43,147,217,481.70	127.18	31,988,385,012.50
5.1.04	Belanja Subsidi	2,525,000,000.00	2,525,000,000.00	100.00	2,735,558,710.00
5.1.04.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	100.00	2,735,558,710.00
5.1.04.04	Belanja Subsidi kepada Koperasi	25,000,000.00	25,000,000.00	100.00	0.00
5.1.05	Belanja Hibah	42,232,076,000.00	40,026,795,041.00	94.77	80,845,739,144.00
5.1.05.02	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	0.00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	40,331,201,000.00	38,125,920,041.00	94.53	79,046,357,900.00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1,850,875,000.00	1,850,875,000.00	100.00	1,799,381,244.00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	12,252,000,000.00	11,877,905,000.00	96.94	21,828,001,450.00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	12,170,000,000.00	11,865,905,000.00	97.50	16,673,006,000.00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	82,000,000.00	12,000,000.00	14.63	5,154,995,450.00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	1,075,083,720,236.50	959,174,446,046.86	89.21	1,020,479,418,028.50
5.2	BELANJA MODAL	525,317,095,814.50	514,295,877,771.00	97.90	533,283,206,421.20
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54,753,632,158.50	50,913,052,172.00	92.98	76,322,201,311.00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	2,547,781,000.00	2,525,048,500.00	99.10	3,644,201,450.00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	18,245,324,719.00	17,313,596,599.00	94.89	31,183,367,725.00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bangkai dan Alat Ukur	3,330,000.00	3,330,000.00	100.00	609,763,700.00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	53,500,000.00	51,121,250.00	95.55	1,151,889,350.00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	9,438,751,340.00	8,706,658,347.00	92.24	9,771,135,318.00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	12,552,042,300.00	11,959,162,725.00	95.27	5,257,276,355.00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	1,284,500,000.00	1,280,501,052.00	99.68	9,669,902,671.00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	546,098,000.00	508,315,023.75	93.08	1,248,294,659.00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	7,683,619,249.50	7,175,429,596.25	93.38	11,250,748,833.00
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	0.00	0.00	0.00	234,223,250.00
5.2.02.12	Belanja Modal Alat Pengeboran	0.00	0.00	0.00	239,600,000.00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	25,000,000.00	0.00	0.00	358,279,250.00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	191,886,000.00	186,586,929.00	97.23	229,200,000.00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	31,799,550.00	31,495,000.00	99.04	48,000,000.00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2,150,000,000.00	1,171,807,150.00	54.50	1,426,318,750.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	176,967,028,701.00	172,512,642,353.00	97.48	146,962,062,900.10
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	172,763,028,480.00	168,467,170,853.00	97.51	146,093,604,900.10
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	4,104,000,221.00	4,045,471,500.00	98.57	868,458,000.00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	290,285,910,955.00	287,563,196,250.00	99.06	309,512,765,006.10
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	221,583,978,732.00	219,803,233,750.00	99.19	236,241,011,474.00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	48,271,932,223.00	47,450,875,500.00	98.29	45,233,289,533.10
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	7,050,000,000.00	7,038,889,000.00	99.84	16,510,200,000.00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	13,380,000,000.00	13,270,198,000.00	99.17	11,528,263,999.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	221,329,000.00	218,199,996.00	98.58	44,337,204.00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	221,329,000.00	218,199,996.00	98.58	25,185,204.00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0.00	0.00	0.00	19,152,000.00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	3,089,195,000.00	3,088,787,000.00	99.98	441,840,000.00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	3,089,195,000.00	3,088,787,000.00	99.98	441,840,000.00
	JUMLAH BELANJA MODAL	525,317,095,814.50	514,295,877,771.00	97.90	533,283,206,421.20
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10,377,625,000.00	6,022,666,080.00	58.03	423,718,824.00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10,377,625,000.00	6,022,666,080.00	58.03	423,718,824.00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	10,377,625,000.00	6,022,666,080.00	58.03	423,718,824.00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	10,377,625,000.00	6,022,666,080.00	58.03	423,718,824.00



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025

5.4	BELANJA TRANSFER	185,974,208,769.00	160,627,622,772.00	86.37	212,568,131,276.00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	8,786,065,769.00	1,380,490,812.00	15.71	0.00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	8,022,601,070.00	1,380,490,812.00	17.20	0.00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	763,464,699.00	0.00	0.00	0.00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	177,188,143,000.00	159,247,131,960.00	89.87	212,568,131,276.00
5.4.02.01	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	0.00
5.4.02.04	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	177,178,143,000.00	159,237,131,960.00	89.87	212,528,131,276.00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	185,974,208,769.00	160,627,622,772.00	86.37	212,568,131,276.00
	JUMLAH BELANJA	1,796,752,648,820.00	1,640,120,612,668.86	91.28	1,766,754,474,549.70
	SURPLUS/DEFISIT	(148,155,484,644.77)	(95,297,141,098.78)	64.32	65,117,072,463.28
6	PEMBAYAAAN DAERAH	148,155,484,644.77	150,809,699,457.77	101.79	97,969,438,914.19
6.1	PENERIMAAN PEMBAYAAAN	164,192,653,173.77	164,192,653,173.77	100.00	110,419,438,914.19
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	164,192,653,173.77	164,192,653,173.77	100.00	110,419,438,914.19
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	164,192,653,173.77	164,192,653,173.77	100.00	110,419,438,914.19
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBAYAAAN	164,192,653,173.77	164,192,653,173.77	100.00	110,419,438,914.19
6.2	PENGELUARAN PEMBAYAAAN	16,037,168,529.00	13,382,953,716.00	83.44	12,450,000,000.00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0.00	0.00	0.00	12,300,000,000.00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	0.00	0.00	0.00	12,300,000,000.00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	16,037,168,529.00	13,382,953,716.00	83.44	150,000,000.00
6.2.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	16,037,168,529.00	13,382,953,716.00	83.44	150,000,000.00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBAYAAAN	16,037,168,529.00	13,382,953,716.00	83.44	12,450,000,000.00
	PEMBAYAAAN NETO	148,155,484,644.77	150,809,699,457.77	101.79	97,969,438,914.19
	SISA LEBIH PEMBAYAAAN ANGGARAN	0.00	55,512,558,358.99	0.00	163,086,511,377.47



BAB IV PENUTUP

Sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Barito Selatan serta dalam rangka mewujudkan good governance. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito Selatan yang disusun sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat **keberhasilan dan kegagalan** pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai program dan kebijakan yang diprioritaskan sesuai arah kebijakan yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023 -2026

Berbagai keberhasilan yang dicapai sebagaimana visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Selatan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada rentang tahun 2023-2026 patut disyukuri, mengingat bahwa pencapaiannya diraih dengan cara yang tidak mudah, jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan berupaya seoptimal mungkin untuk mengakomodasi berbagai keinginan dan kepentingan semua lapisan masyarakat sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan melalui pendayagunaan sumber daya yang relatif terbatas. Sangat disadari,



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025

disamping beberapa keberhasilan yang telah dicapai, masih terdapat permasalahan-permasalahan yang segera diatasi dan dibenahi.

Selaras dengan komitmen yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 yang bertujuan untuk pencapaian indikator kinerja sebagaimana arah kebijakan yang telah ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026. Ditetapkan dengan program dan kegiatan Perangkat Daerah (PD) melalui penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Barito Selatan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan seperti dalam tabel berikut :

Tabel 4.1.
Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 s.d. 2025

No	Tahun	Nilai	Predikat
1.	2017	47,06	C
2.	2018	56.90	CC
3.	2019	57,46	CC
4.	2020	59,04	CC
5.	2021	57,19	CC
6.	2022	56,47	CC
7.	2023	60,28	B
8.	2024	61.02	B
9.	2025	61,34	B



Namun hasil penilaian tersebut masih memerlukan perbaikan lebih lanjut karena tingkat efektivitas dan efesiensi penggunaan anggaran masih rendah jika dihubungkan dengan capaian kinerja. Hal ini disebabkan oleh kualitas pembangunan budaya kinerja dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

Upaya perbaikan kedepan tetap terus dilakukan agar laporan LaKIP menyajikan informasi-informasi yang selaras dengan tujuan/sasaran yang tertuang di dalam Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada sasaran dan indikator kinerja pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Sebagai tindak lanjut Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Penyusun Laporan Kinerja dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan. Maka Tim Peningkatan SAKIP Kabupaten Barito Selatan melakukan hal sebagai berikut:

- a. Perbaikan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan upaya perbaikan penerapan SAKIP di Kabupaten Barito Selatan sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan fokus pada hal-hal yang strategis.
- b. Melakukan koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten dan Biro Organisasi dalam hal kegiatan evaluasi AKIP untuk menindaklanjuti rekomendasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.



- c. Perbaikan-perbaikan terhadap beberapa sasaran yang tidak berhasil mencapai target yang sudah ditentukan dalam sasaran indikator kinerja dalam RPD Kabupaten Barito Selatan.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan ini dapat dijadikan bahan evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Inspektorat dalam rangka mewujudkan semangat tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan memberikan rekomendasi serta catatan-catatan untuk penyempurnaan dan perbaikan kebijakan pembangunan strategis dalam rangka mencapai pembangunan masyarakat Barito Selatan yang ***Dahani Dahanai Tuntung Tulus (Menuju Masyarakat Adil dan Makmur Sampai Selama-lamanya.***